



# ANALISIS SITUASI PEMBANGUNAN MANUSIA

KABUPATEN JAYAWIJAYA

2025



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN JAYAWIJAYA

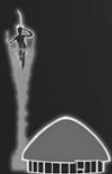




# ANALISIS SITUASI PEMBANGUNAN MANUSIA

KABUPATEN JAYAWIJAYA

2025



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN JAYAWIJAYA

Analisis Situasi Pembangunan Manusia  
Kabupaten Jayawijaya  
2025

Katalog: -

ISSN: -

Nomor Publikasi: -

Ukuran Buku: 16,22 cm x 22,9 cm

Jumlah Halaman: xvi + 92 hal

Penyusun Naskah:

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya

Penyunting:

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya

Pembuat Kover:

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya

Penerbit

© Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya

Sumber Ilustrasi: freepik.com

Dilarang mereproduksi dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya.



## **BUPATI JAYAWIJAYA**



**Atenius Murip, SH, MH**

## WAKIL BUPATI JAYAWIJAYA



**Ronny Elopere, S.IP, M.KP**

**TIM PENYUSUN**

**ANALISIS SITUASI PEMBANGUNAN  
MANUSIA KABUPATEN JAYAWIJAYA 2025**

**Pengarah**

Arklaus Windesi, S.Sos, M.Si

**Penanggung Jawab**

Arklaus Windesi, S.Sos, M.Si

**Penyunting**

Dinas Komunikasi dan Informatika

**Pengolah Data dan Penulis Naskah**

Dinas Komunikasi dan Informatika

**Penata Letak**

Dinas Komunikasi dan Informatika



## KONTRIBUTOR DATA

1. Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya
2. Badan Pusat Statistik Kabupaten Jayawijaya
3. Badan Pusat Statistik Provinsi Papua
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayawijaya
5. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) melalui Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
6. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) – Stasiun Meteorologi Kelas III Wamena

## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya publikasi “Analisis Situasi Pembangunan Manusia (ASPM) Kabupaten Jayawijaya Tahun 2025” dapat diterbitkan. Publikasi ini diharapkan menjadi rujukan dalam melihat capaian pembangunan manusia serta mendukung perencanaan pembangunan daerah yang berbasis data.

Pembangunan manusia mencakup tiga dimensi utama, yaitu umur panjang, pengetahuan, dan standar hidup layak. Dengan pemahaman ini, arah pembangunan di Kabupaten Jayawijaya diharapkan lebih mudah diwujudkan. Terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah berkontribusi. Semoga publikasi ini memberi manfaat bagi pembangunan daerah.



Wamena, Oktober 2025

**Kepala Dinas**

**Komunikasi dan Informatika**

**Kabupaten Jayawijaya**



**Arklaus Windesi, S.Sos, M.Si**

# DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN .....	viii
KONTRIBUTOR DATA.....	ix
KATA PENGANTAR .....	x
DAFTAR ISI .....	xi
DAFTAR TABEL .....	xiii
DAFTAR GAMBAR .....	xv
<i>BAB I PENDAHULUAN</i> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	2
1.2 Tujuan dan Sasaran .....	5
1.3 Ruang Lingkup .....	7
1.3.1 Ruang Lingkup Materi.....	7
1.3.2 Ruang Lingkup Wilayah.....	8
1.4 Istilah-Istilah yang Digunakan (Terminologi) .....	8
<i>BAB II DATA DAN METODOLOGI</i> .....	11
2.1 Indeks Pembangunan Manusia .....	12
2.2 Manfaat IPM.....	13
2.3 Perkembangan Metodologi IPM.....	14
2.4 Perubahan Metodologi IPM Tahun 2014 .....	16
2.5 Komponen IPM.....	17
2.6 Teknis Penghitungan IPM Metode Baru .....	20

2.7 Konsep dan Definisi Disparitas Pembangunan Manusia dan Reduksi <i>Shortfall</i> .....	29
<i>BAB III GAMBARAN UMUM WILAYAH</i> .....	31
3.1 Kondisi Geografi dan Iklim.....	32
3.2 Kependudukan.....	34
<i>BAB IV ANALISIS</i> .....	41
4.1 Perkembangan IPM Kabupaten Jayawijaya Tahun 2020–2024.....	42
4.1.1 Pertumbuhan IPM .....	44
4.2 Pencapaian Pembangunan Kapabilitas Dasar Manusia.....	46
4.2.1 Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat .....	48
4.2.2 Dimensi Pengetahuan.....	49
4.2.3 Dimensi Standar Hidup Layak .....	51
4.3 Indikator Kesehatan, Pendidikan dan Perekonomian Kabupaten Jayawijaya .....	53
4.3.1 Indikator Kesehatan .....	53
4.3.2 Indikator Pendidikan.....	64
4.3.3 Indikator Perekonomian .....	74
<i>BAB V PENUTUP</i> .....	83
5.1 Kesimpulan .....	84
5.2 Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA .....	88
LAMPIRAN .....	92

## DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Tabel Klasifikasi Capaian IPM.....	20
Tabel 2. 2 Tabel Konversi Lama Sekolah .....	23
Tabel 2. 3 Tabel Konversi Lama Sekolah Berdasarkan Ijazah.....	23
Tabel 3. 1 Jumlah Penduduk, Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk per Kilometer Persegi, dan Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kabupaten Jayawijaya Menurut Kecamatan, 2024....	36
Tabel 4. 1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Jayawijaya Menurut Komponen, 2020-2024 .....	46
Tabel 4. 2 Fasilitas dan Tenaga Kesehatan di Kabupaten Jayawijaya, 2022 - 2024 .....	54
Tabel 4. 3 Persentase Anak Usia Kurang dari 2 Tahun yang Pernah diberi ASI dan Lamanya Pemberian ASI di Kabupaten Jayawijaya, 2022-2024 .....	57
Tabel 4. 4 Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Utama yang Digunakan Untuk Mandi/Cuci/dll di Kabupaten Jayawijaya, 2024 .....	60
Tabel 4. 5 Jumlah Sekolah, Murid, Guru dan Rasio Murid-Guru Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Jayawijaya, 2024/2025.....	71
Tabel 4. 6 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Jayawijaya, 2024 .....	77
Tabel 4. 7 Rata-rata Pengeluaran dan Konsumsi per Kapita di Kabupaten Jayawijaya, 2024 .....	81



## DAFTAR GAMBAR

Grafik 3. 1 Piramida Penduduk Kabupaten Jayawijaya Tahun 2020 .....	35
Grafik 4. 1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Jayawijaya, 2020-2024 .....	44
Grafik 4. 2 Perkembangan Pertumbuhan IPM Kabupaten Jayawijaya, 2020-2024 .....	45
Grafik 4. 3 Angka Harapan Hidup (AHH) Saat Lahir di Kabupaten Jayawijaya (tahun), 2020-2024 .....	49
Grafik 4. 4 Perkembangan Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Jayawijaya, 2020-2024 .....	50
Grafik 4. 5 Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Jayawijaya, 2020-2024 .....	51
Grafik 4. 6 Perkembangan Pengeluaran per Kapita di Kabupaten Jayawijaya, 2010-2024 .....	52
Grafik 4. 7 Angka Kesakitan Penduduk menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Jayawijaya, 2022-2024 .....	55
Grafik 4. 8 Persentase Balita yang Mendapat Imunisasi di Kabupaten Jayawijaya, 2024 .....	58
Grafik 4. 9 Persentase Perempuan 15-49 Tahun yang Pernah Kawin dan Penolong Proses Kelahiran Terakhir Kabupaten Jayawijaya, 2022 - 2024 .....	59
Grafik 4. 10 Persentase Rumah Tangga Menurut Fasilitas Tempat BAB di Kabupaten Jayawijaya, 2024 .....	62
Grafik 4. 11 Persentase Rumah Tangga Menurut Tempat Pembuangan Akhir Tinja di Kabupaten Jayawijaya, 2024 .....	63

Grafik 4. 12 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Kemampuan Membaca dan Menulis di Kabupaten Jayawijaya, 2024.....	65
Grafik 4. 13 Penduduk Berumur 7-23 Tahun menurut Jenis Kelamin dan Status Pendidikan Kabupaten Jayawijaya, 2024 ....	67
Grafik 4. 14 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kabupaten Jayawijaya, 2020-2024.....	69
Grafik 4. 15 Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) di Kabupaten Jayawijaya, 2020-2024.....	70
Grafik 4. 16 Perkembangan PDRB per Kapita (Rp) di Kabupaten Jayawijaya, 2020-2024 .....	75



# *BAB I*

## *PENDAHULUAN*

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Sebelum memasuki periode 1970-an, pembangunan masih dipahami terutama sebagai fenomena ekonomi. Paradigma klasik kala itu menitikberatkan pada bagaimana mendorong pertumbuhan ekonomi setinggi mungkin melalui tabungan masyarakat, investasi modal, dan bantuan luar negeri. Dengan demikian, pembangunan ekonomi ditempatkan sebagai inti kemajuan bangsa, sementara manusia lebih sering diposisikan sebagai instrumen untuk mencapainya. Walaupun pendekatan tersebut sempat menghasilkan laju pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, kenyataannya peningkatan itu tidak mampu secara signifikan memperbaiki kualitas hidup mayoritas penduduk. Banyak persoalan mendasar seperti kesenjangan sosial, kemiskinan, dan keterbatasan akses pendidikan maupun kesehatan tetap mengemuka.

Seiring perkembangan, paradigma pembangunan yang semata-mata menekankan aspek ekonomi mulai dipertanyakan. Lembaga internasional, akademisi, dan praktisi pembangunan melihat perlunya pendekatan baru yang lebih berpusat pada manusia. Pada tahun 1990, United Nations Development Programme (UNDP) memperkenalkan konsep human development atau pembangunan manusia, yang menempatkan manusia bukan hanya sebagai sarana, tetapi sebagai tujuan akhir pembangunan. Konsep ini menegaskan bahwa manusia adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya, dan tujuan utama

pembangunan adalah menciptakan kondisi yang memungkinkan masyarakat hidup panjang umur, sehat, serta produktif.

Pembangunan manusia menjadi paradigma baru yang lebih komprehensif, karena menempatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat sebagai indikator utama keberhasilan pembangunan. Masalah-masalah mendasar seperti kemiskinan, pengangguran, gizi buruk, dan buta huruf dijadikan tolok ukur. Bank Dunia melalui World Development Report tahun 1991 turut menegaskan bahwa tantangan terbesar pembangunan adalah meningkatkan kualitas kehidupan. Pembangunan dipahami bukan sekadar proses ekonomi, melainkan juga proses multidimensi yang mencakup transformasi struktur sosial, perubahan sikap masyarakat, hingga pembenahan institusi nasional.

Untuk mengukur capaian pembangunan manusia secara terstandar, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kemudian merumuskan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI). Menurut UNDP, IPM merupakan proses memperluas pilihan manusia (a process of enlarging the choices of people). IPM disusun berdasarkan tiga dimensi utama, yaitu: umur panjang (longevity) yang menggambarkan aspek kesehatan, tingkat pengetahuan (knowledge) yang mencerminkan kualitas pendidikan, serta standar hidup layak (decent living) yang diukur melalui indikator ekonomi. Dengan tiga dimensi ini, IPM memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai kondisi pembangunan manusia.

Kehadiran konsep pembangunan manusia tidak berarti menafikan strategi pembangunan sebelumnya, seperti percepatan pertumbuhan ekonomi atau pengentasan

kemiskinan. Namun, pembangunan manusia menempatkan seluruh strategi tersebut dalam kerangka memperluas pilihan hidup manusia. Dengan demikian, pembangunan tidak lagi semata-mata mengejar pertumbuhan ekonomi, melainkan juga memastikan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat dalam bentuk peningkatan kualitas hidup.

Sejak diperkenalkan pada tahun 1990, metode penghitungan IPM telah mengalami berbagai penyempurnaan. Revisi besar dilakukan pada tahun 2010, kemudian disempurnakan pada tahun 2011 dan 2014. Publikasi IPM setelah tahun 2016 menggunakan metode terbaru hasil penyempurnaan tersebut, sehingga hasilnya lebih mutakhir dan akurat. Dengan perkembangan metodologi ini, IPM kini menjadi salah satu ukuran internasional yang dapat digunakan untuk membandingkan capaian pembangunan manusia antarwilayah maupun antarnegara.

Dalam konteks Indonesia, khususnya di Papua Pegunungan, pengukuran IPM memiliki arti penting karena tantangan pembangunan di wilayah ini relatif lebih kompleks dibanding daerah lain. Kabupaten Jayawijaya, sebagai pusat sosial, ekonomi, dan pemerintahan di kawasan pegunungan, menghadapi berbagai hambatan pembangunan, mulai dari keterbatasan infrastruktur, kesenjangan pendidikan, hingga masalah kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, pengukuran IPM yang akurat sangat diperlukan sebagai dasar penyusunan kebijakan yang relevan dan tepat sasaran.

Berdasarkan kebutuhan tersebut, disusun publikasi Analisis Situasi Pembangunan Manusia (ASPM) Kabupaten

Jayawijaya Tahun 2025. Publikasi ini menggunakan metode penghitungan IPM terbaru yang telah diadopsi secara internasional. Tujuannya adalah untuk menyajikan gambaran yang lebih komprehensif dan terkini mengenai kondisi pembangunan manusia di Jayawijaya. Publikasi ini tidak hanya berfungsi sebagai catatan indikator kuantitatif atas capaian pembangunan yang telah dilaksanakan, tetapi juga menjadi landasan awal (starting point) dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan ke depan.

Dengan adanya publikasi ASPM Tahun 2025 ini, diharapkan pembangunan di Kabupaten Jayawijaya dapat semakin terarah, tepat sasaran, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021, yang menekankan pentingnya penyelenggaraan pembangunan daerah yang berfokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui penguatan pelayanan pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi lokal. Dengan demikian, pembangunan manusia menjadi kerangka kerja utama dalam upaya mewujudkan masyarakat Jayawijaya yang lebih sehat, cerdas, dan sejahtera di masa depan.

## **1.2 Tujuan dan Sasaran**

Tujuan utama dari penyusunan publikasi Analisis Situasi Pembangunan Manusia (ASPM) Kabupaten Jayawijaya Tahun 2025 adalah untuk menyajikan data dan informasi yang

komprehensif mengenai kondisi penduduk beserta permasalahan yang dihadapi sebagai akibat dari dinamika pembangunan yang telah dilaksanakan di Kabupaten Jayawijaya. Informasi yang disajikan tidak hanya mencakup aspek kuantitatif berupa indikator statistik, tetapi juga bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih luas mengenai kualitas hidup masyarakat, perkembangan sosial, dan tantangan pembangunan manusia di berbagai sektor.

Publikasi ini diharapkan dapat menjadi referensi penting bagi pemerintah daerah, akademisi, organisasi masyarakat sipil, serta pemangku kepentingan lainnya dalam memahami kondisi nyata pembangunan manusia di Kabupaten Jayawijaya. Dengan demikian, data yang disajikan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam perencanaan pembangunan, pengambilan keputusan, dan perumusan kebijakan yang berorientasi pada pemberdayaan sumber daya manusia. Selain itu, publikasi ini juga dimaksudkan sebagai instrumen untuk mengidentifikasi sektor-sektor prioritas yang perlu mendapat perhatian lebih besar dalam rangka mempercepat pencapaian pembangunan manusia di Jayawijaya, baik di bidang kesehatan, pendidikan, maupun ekonomi.

Lebih jauh lagi, tujuan publikasi ini adalah memastikan bahwa pembangunan di Kabupaten Jayawijaya sejalan dengan paradigma pembangunan manusia yang menekankan perluasan pilihan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dengan adanya publikasi ASPM 2025, diharapkan arah pembangunan yang dirancang ke depan tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan

penduduk secara menyeluruh melalui penguatan kapasitas, akses layanan dasar, dan pemerataan pembangunan antarwilayah.

Sasaran yang ingin dicapai dalam kegiatan penyusunan publikasi ASPM Kabupaten Jayawijaya Tahun 2025 meliputi:

1. Teridentifikasinya kondisi beberapa variabel sektoral dalam pembangunan manusia, meliputi sektor-sektor: kesehatan, pendidikan, dan ekonomi di Kabupaten Jayawijaya.
2. Diperolehnya gambaran permasalahan di bidang pembangunan manusia di Kabupaten Jayawijaya.
3. Diperolehnya gambaran tentang perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan indikator-indikator sosial lainnya di Kabupaten Jayawijaya.
4. Diperolehnya rumusan implikasi masalah dan kebijakan untuk menangani berbagai permasalahan yang merupakan bagian dari perencanaan dan penanganan pembangunan manusia.

## **1.3 Ruang Lingkup**

### **1.3.1 Ruang Lingkup Materi**

Ruang lingkup materi dalam penyusunan publikasi Analisis Situasi Pembangunan Manusia (ASPM) Kabupaten Jayawijaya Tahun 2025 mencakup beberapa aspek pokok sebagai berikut:

1. Identifikasi variabel kunci dalam pengukuran IPM, yang meliputi tiga dimensi utama: lamanya hidup (longevity),

pengetahuan (knowledge), serta standar hidup layak (decent living).

2. Identifikasi permasalahan mendasar pada sektor-sektor utama yang berkaitan erat dengan IPM, yaitu sektor kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.
3. Penghitungan besaran Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Jayawijaya berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan.
4. Analisis situasi pembangunan manusia di Kabupaten Jayawijaya dengan mengacu pada hasil penghitungan IPM dan indikator pendukung lainnya.
5. Perumusan kebijakan pembangunan manusia, yang disusun berdasarkan capaian IPM serta hasil analisis situasi pembangunan manusia di Kabupaten Jayawijaya.

### **1.3.2 Ruang Lingkup Wilayah**

Ruang lingkup yang dibahas dalam publikasi ini mencakup seluruh wilayah Kabupaten Jayawijaya.

## **1.4 Istilah-Istilah yang Digunakan (Terminologi)**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks komposit yang dibentuk dari tiga dimensi utama, yaitu umur panjang (longevity), pengetahuan (knowledge/pendidikan), dan standar hidup layak (decent living). Komponen penyusunnya meliputi:

1. Indeks Harapan Hidup (IHH)  
Menggambarkan perkiraan rata-rata lama hidup penduduk (angka harapan hidup atau  $e_0$ ) dengan asumsi



tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. Nilai indeks ini berada dalam rentang 0–100.

## 2. Indeks Pendidikan

Disusun dari beberapa indikator, yaitu:

- a. Angka Melek Huruf (AMH): proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang mampu membaca dan menulis dengan huruf latin maupun huruf lainnya.
- b. Harapan Lama Sekolah (HLS): jumlah tahun sekolah yang diharapkan dapat ditempuh oleh anak pada usia tertentu di masa mendatang.
- c. Rata-rata Lama Sekolah (RLS): rata-rata lamanya pendidikan formal yang telah ditempuh oleh penduduk, yang dapat disetarakan dengan jenjang pendidikan tertentu.

## 3. Indeks Standar Hidup Layak

Didasarkan pada indikator daya beli masyarakat atau Purchasing Power Parity (PPP) yang telah disesuaikan dengan rumus Atkinson. Indeks ini mencerminkan kemampuan penduduk dalam memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kualitas hidupnya.



# *BAB II*

## *DATA DAN METODOLOGI*

## BAB II DATA DAN METODOLOGI

### 2.1 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu ukuran penting untuk menilai dampak kinerja pembangunan suatu wilayah, karena mampu menunjukkan kualitas penduduk dari aspek harapan hidup, tingkat intelektualitas, serta standar hidup yang layak. Melalui IPM, dapat terlihat sejauh mana penduduk mampu mengakses hasil pembangunan dalam bentuk peningkatan pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan dasar lainnya.

Konsep IPM pertama kali diperkenalkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 1990 dan sejak itu dipublikasikan secara berkala dalam Human Development Report. IPM termasuk ke dalam kategori indeks atau indikator komposit, yakni ukuran multidimensional yang dibangun dari gabungan sejumlah indikator untuk merepresentasikan kondisi kompleks secara lebih ringkas. Indeks jenis ini biasanya memerlukan penelitian khusus karena sifatnya yang lebih rumit dan penggunaannya yang terbatas dalam praktik.

Idealnya, IPM mencakup sebanyak mungkin variabel agar benar-benar mampu menggambarkan berbagai aspek kehidupan manusia yang luas dan kompleks. Namun, keterbatasan data statistik membuat IPM dibangun dari indikator-indikator tertentu yang paling mewakili kondisi mendasar pembangunan manusia. Pada tahap awal, penyusunan IPM difokuskan pada tiga dimensi

utama kehidupan manusia, yaitu usia harapan hidup, pengetahuan, dan standar hidup layak. Indikator-indikator penyusunnya dipilih secara hati-hati agar mampu menangkap secara representatif berbagai dimensi dari pilihan hidup manusia.

## **2.2 Manfaat IPM**

Penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai indikator pembangunan memberikan sejumlah manfaat strategis, di antaranya:

1. Menjadi indikator utama dalam menilai keberhasilan pembangunan, khususnya dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
2. Berfungsi sebagai dasar untuk menentukan peringkat atau level capaian pembangunan suatu wilayah.
3. Menyediakan data strategis yang tidak hanya digunakan sebagai tolok ukur kinerja pemerintah, tetapi juga menjadi salah satu dasar penentuan alokasi Dana Alokasi Umum (DAU).

Tujuan dilaksanakannya penghitungan IPM dapat dirinci sebagai berikut:

1. Menghadirkan indikator yang mampu mengukur dimensi dasar pembangunan manusia serta perluasan pilihan hidup penduduk.
2. Memanfaatkan sejumlah indikator terpilih untuk menjaga ukuran tetap sederhana, mudah dipahami, dan terukur.
3. Menyusun satu indeks komposit yang merepresentasikan pembangunan manusia secara menyeluruh, daripada

hanya menggunakan beberapa indeks dasar secara terpisah.

4. Mewujudkan suatu ukuran yang mampu mencakup baik aspek sosial maupun aspek ekonomi dalam pembangunan manusia.

### **2.3 Perkembangan Metodologi IPM**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pertama kali diperkenalkan pada tahun 1990 dengan menggunakan tiga komponen utama, yaitu Angka Harapan Hidup (AHH), Angka Melek Huruf (AMH), dan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita. Setahun kemudian, pada 1991, dilakukan penyempurnaan dengan menambahkan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) sehingga komponen yang digunakan menjadi AHH, AMH, RLS, dan PDB per kapita.

Penyempurnaan berikutnya dilakukan pada tahun 1995, di mana indikator pendidikan dikembangkan dengan menambahkan Angka Partisipasi Kasar (APK) yang dikombinasikan dengan AMH, sementara indikator lainnya tetap sama yaitu AHH dan PDB per kapita.

Perubahan besar terjadi pada tahun 2010 ketika UNDP memperbarui metodologi penghitungan IPM. Komponen yang digunakan sejak saat itu terdiri dari AHH, Harapan Lama Sekolah (HLS), RLS, dan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita, dengan metode agregasi indeks menggunakan rata-rata geometrik.

Pada tahun 2011 kembali dilakukan penyesuaian, yaitu perubahan tahun dasar PNB per kapita dari 2008 menjadi 2005. Selanjutnya, pada tahun 2014 dilakukan penyempurnaan lanjutan dengan mengganti tahun dasar PNB per kapita dari 2005 menjadi 2011 serta mengganti metode agregasi indeks pendidikan, yang semula menggunakan rata-rata aritmatik menjadi rata-rata geometrik.

Untuk penyusunan IPM Kabupaten Jayawijaya, sebagian besar data bersumber dari data primer yang dikumpulkan langsung oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Jayawijaya melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) semesteran tahun 2024. SUSENAS merupakan survei nasional yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia dengan cakupan data sosial-kependudukan yang luas, antara lain pendidikan, kesehatan dan gizi, perumahan, sosial budaya, konsumsi/pengeluaran rumah tangga, serta berbagai aspek sosial ekonomi lainnya.

Data yang dikumpulkan dalam SUSENAS terdiri dari dua jenis: data KOR (keterangan pokok) yang mencakup informasi dasar sosial-ekonomi rumah tangga, dan data MODUL (keterangan khusus) yang berfokus pada isu-isu tertentu sesuai kebutuhan statistik nasional.

Pelaksanaan SUSENAS di Kabupaten Jayawijaya dilakukan dengan jumlah sampel tertentu yang tersebar di delapan kecamatan. Setiap kecamatan dipilih beberapa desa sebagai sampel, dan setiap desa dibagi ke dalam blok sensus untuk memudahkan pengumpulan data. Dengan rancangan ini, data yang diperoleh diharapkan mampu mewakili kondisi sosial

ekonomi penduduk Kabupaten Jayawijaya secara akurat dan dapat digunakan untuk menghitung IPM tahun 2025.

## **2.4 Perubahan Metodologi IPM Tahun 2014**

Pada tahun 2014, UNDP melakukan perubahan penting dalam metodologi penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Perubahan ini mencakup penggantian indikator serta penyempurnaan metode agregasi. Dalam dimensi pendidikan, indikator Angka Melek Huruf (AMH) yang sebelumnya digunakan diganti dengan Harapan Lama Sekolah (HLS) karena AMH dianggap sudah tidak lagi relevan untuk menggambarkan kualitas pendidikan. AMH di sebagian besar daerah telah mencapai angka yang tinggi sehingga kurang mampu membedakan kondisi pendidikan antarwilayah. Selain itu, dalam dimensi ekonomi, Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita diganti dengan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita karena dinilai lebih mencerminkan pendapatan riil masyarakat di suatu wilayah. Pada saat yang sama, penghitungan Purchasing Power Parity (PPP) juga diperbarui, di mana jumlah komoditas yang digunakan dalam metode lama sebanyak 27 komoditas diperluas menjadi 96 komoditas untuk menghasilkan ukuran yang lebih representatif.

Selain perubahan indikator, metode agregasi IPM juga diubah dari rata-rata aritmatik menjadi rata-rata geometrik. Perubahan ini dilakukan karena rata-rata aritmatik memungkinkan capaian rendah di suatu dimensi tertutupi oleh capaian tinggi pada dimensi lainnya, sehingga hasil penghitungan kurang mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Dengan penggunaan rata-rata geometrik, capaian rendah di salah satu



dimensi tidak bisa ditutupi oleh capaian tinggi di dimensi lain, yang berarti ketiga dimensi IPM—kesehatan, pendidikan, dan standar hidup—harus sama-sama diperhatikan karena memiliki bobot kepentingan yang setara.

Secara keseluruhan, perubahan metodologi tahun 2014 menjadikan IPM lebih relevan, akurat, dan diskriminatif. Dengan memasukkan indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS), kualitas pendidikan dapat tergambarkan dengan lebih baik, termasuk dinamika perubahannya dari waktu ke waktu. Sementara itu, penggunaan PNB per kapita memperkuat dimensi ekonomi karena lebih mendekati kondisi pendapatan riil masyarakat. Perubahan ini menegaskan bahwa pembangunan manusia tidak dapat hanya bertumpu pada salah satu dimensi, melainkan harus menekankan keseimbangan antara kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak.

## **2.5 Komponen IPM**

Sebagai ukuran kualitas hidup, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan, serta kehidupan yang layak.

Dalam pengukurannya, dimensi kesehatan menggunakan angka harapan hidup saat lahir, dimensi pengetahuan diukur melalui gabungan indikator harapan lama sekolah (HLS) dan rata-rata lama sekolah (RLS), sedangkan dimensi standar hidup layak diukur dengan indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan.

Penjelasan singkat mengenai masing-masing komponen IPM adalah sebagai berikut:

### **1. Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH)**

Angka Harapan Hidup adalah rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh seseorang sejak lahir. Indikator ini mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. Perhitungannya menggunakan pendekatan tidak langsung (indirect estimation), dengan memanfaatkan dua jenis data yaitu anak lahir hidup (ALH) dan anak masih hidup (AMH).

Perhitungan dilakukan menggunakan paket program Mortpack dengan input data ALH dan AMH, kemudian dipilih metode Trussel dengan model West, yang sesuai dengan histori kependudukan Indonesia serta kondisi negara-negara Asia Tenggara pada umumnya (Preston, 2004). Dalam komponen ini, batas atas yang digunakan adalah 85 tahun dan batas bawah 20 tahun, sesuai standar UNDP dan BPS.

### **2. Pengetahuan**

Dimensi pendidikan diukur dengan dua indikator utama, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS).

HLS adalah perkiraan lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat ditempuh oleh seorang anak pada umur tertentu di masa mendatang, dengan asumsi bahwa kemungkinan anak tersebut tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan rasio penduduk yang bersekolah saat ini pada kelompok

umur yang sama. Indikator ini menggambarkan prospek pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang.

RLS mencerminkan rata-rata jumlah tahun pendidikan formal yang telah ditempuh oleh penduduk usia 15 tahun ke atas. Namun, cakupan penghitungan RLS dilakukan pada penduduk usia 25 tahun ke atas dengan asumsi bahwa pada umur tersebut proses pendidikan umumnya sudah selesai. Pendekatan ini sejalan dengan standar internasional yang digunakan UNDP.

Dalam perhitungan indeks pendidikan, ditetapkan batas maksimum dan minimum sesuai standar UNDP dan BPS. Untuk HLS, batas maksimum adalah 18 tahun dan minimum 0 tahun, sedangkan untuk RLS batas maksimum 15 tahun dan minimum 0 tahun. Nilai maksimum tersebut setara dengan tingkat pendidikan lulus Sekolah Menengah Atas (SMA).

### **3. Hidup Layak**

Dimensi ketiga IPM adalah standar hidup layak yang menggambarkan tingkat kesejahteraan penduduk sebagai dampak dari peningkatan kondisi perekonomian. Untuk mengukur dimensi ini, digunakan pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan dengan paritas daya beli (Purchasing Power Parity/PPP).

BPS menetapkan nilai maksimum sebesar Rp26.572.353 dan nilai minimum Rp1.007.436. Dengan indikator ini, dapat dilihat perkembangan status IPM suatu daerah melalui pengelompokan tingkat pembangunan manusia ke dalam empat kategori. Perubahan kategori dilakukan dengan memecah status “menengah/sedang”

menjadi dua bagian, yaitu menengah bawah dan menengah atas.

Apabila suatu daerah masih berada pada kategori rendah, berarti kinerja pembangunan manusia memerlukan perhatian khusus untuk mengejar ketertinggalan. Jika berada pada kategori menengah, pembangunan manusia masih perlu ditingkatkan. Sementara itu, apabila suatu daerah telah mencapai kategori tinggi, berarti pembangunan manusianya sudah cukup baik dan perlu dipertahankan agar kualitas penduduk semakin produktif dan berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas secara keseluruhan.

Tabel 2. 1 Tabel Klasifikasi Capaian IPM

Klasifikasi	Capaian IPM (Achievement of HDI)
Sangat Tinggi / Very High	$IPM \geq 80$
Tinggi / High	$70 \leq IPM < 80$
Sedang / Upper Middle	$60 \leq IPM < 70$
Rendah / Lower Middle	$IPM < 60$

### 2.6 Teknis Penghitungan IPM Metode Baru

1. Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH)

Data yang dibutuhkan untuk memperoleh Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Harapan Hidup dengan Mortpak adalah estimasi rata-rata jumlah anak lahir hidup pada tahun penghitungan dan estimasi rata-rata jumlah anak

masih hidup pada tahun penghitungan. Penentuan AHH untuk IPM secara umum berlaku rata-rata q2, q3, dan q5; adakalanya memakai media/modul yang lebih cocok; perlu pertimbangan keahlian (adjustment), pengalaman, tren atau perbandingan (antar waktu, antar wilayah, antar urban/rural, dsb). AHH perempuan diperoleh dari  $(106/103) \times \text{AHH total}$ ; sudah melalui rekonsiliasi dan telah diseminarkan pada seminar parameter demografi.

Penentuan asumsi berdasarkan tren tingkat mortalitas di masa lalu mengikuti hasil SDKI91, SDKI94, SDKI97, SDKI2002/3, SDKI2007, dan SDKI2012, dengan rumus:

$$y = L + \frac{U}{1 + be^{at}}$$

- y = Perkiraan AKB
- L = Konstanta asymtot bawah AKB
- U = Konstanta asymtot atas AKB
- a,b = Koefisien kurva logistik
- t = Waktu sebagai variabel bebas
- e = Konstanta eksponensial

Rumus Penghitungan Indeks Kesehatan:

$$I_{\text{kesehatan}} = \frac{(AHH - AHH_{\text{min}})}{(AHH_{\text{maks}} - AHH_{\text{min}})}$$

## 2. Harapan Lama Sekolah (HLS)

Langkah pertama yaitu menghitung jumlah penduduk menurut umur (7 tahun ke atas); langkah kedua menghitung

jumlah penduduk yang masih sekolah menurut umur (7 tahun ke atas); langkah ketiga menghitung rasio penduduk yang masih sekolah terhadap jumlah penduduk menurut umur (7 tahun ke atas), langkah ini menghasilkan partisipasi sekolah menurut umur; langkah keempat menghitung harapan lama sekolah, yaitu dengan menjumlahkan semua partisipasi sekolah menurut umur (7 tahun ke atas). Formula yang digunakan yaitu:

$$HLS_a^t = \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$$

Keterangan:

$HLS_a^t$  : Harapan Lama Sekolah umur a di tahun t

$E_i^t$  : Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t

$P_i^t$  : Jumlah penduduk usia i pada tahun t

i : Usia (a, a+1, ..., n)

### 3. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Langkah pertama yaitu menyeleksi penduduk pada usia 25 tahun ke atas; langkah kedua yaitu menghitung lamanya sekolah, jika partisipasi sekolah yaitu tidak/belum pernah sekolah, maka lama sekolah=0, jika partisipasi sekolah yaitu masih sekolah atau tidak bersekolah lagi, maka lama sekolah mengikuti tabel konversi berikut:

Tabel 2. 2 Tabel Konversi Lama Sekolah

<b>Keterangan</b>	<b>Lama Sekolah</b>
Masih bersekolah di SD s.d. S1	Konversi ijazah terakhir + kelas terakhir – 1
Masih bersekolah S2 atau S3	Konversi ijazah terakhir + 1 Ket: Karena di Susenas kode kelas untuk yang sedang kuliah S2 = 6 dan kuliah S3 = 7 yang tidak menunjukkan kelas
Tidak bersekolah lagi tetapi tidak tamat di kelas terakhir	Konversi ijazah terakhir + kelas terakhir – 1
Tidak bersekolah lagi dan tamat pada jenjang	Konversi ijazah terakhir

Tabel 2. 3 Tabel Konversi Lama Sekolah Berdasarkan Ijazah

<b>Ijazah</b>	<b>Konversi Tahun Lama Sekolah (Tahun)</b>
Tidak punya ijazah	0
SD/SDLB/MI/Paket A	6
SMP/SMPLB/MTs/Paket B	9
SMA/SMLB/MA/SMK/Paket C	12
D1/D2	14
D3/Sarjana Muda	15

Ijazah	Konversi Tahun Lama Sekolah (Tahun)
D4/S1	16
S2/S3	18

Langkah ketiga yaitu menghitung rata-rata lama sekolah dengan rumus:

$$RLS = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \text{lama sekolah penduduk}_i$$

Keterangan:

*RLS* : Rata-rata Lama Sekolah di suatu wilayah

*lama sekolah* : lama sekolah penduduk ke-i di suatu wilayah

*penduduk<sub>i</sub>*

*n* : jumlah penduduk ( *i* = 1, 2, 3,..., *n*)

Rumus Indeks Pengetahuan:

$$I_{\text{pengetahuan}} = \frac{I_{HLS} - I_{RLS}}{2}$$

Yang terdiri dari:

$$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{\min}}{HLS_{\max} - HLS_{\min}}$$

$$I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{\min}}{RLS_{\max} - RLS_{\min}}$$



#### 4. Pengeluaran per kapita

Langkah pertama yaitu menghitung rata-rata pengeluaran per kapita; langkah kedua yaitu menghitung rata-rata pengeluaran per kapita dalam harga konstan (riil); langkah ketiga yaitu menghitung Paritas Daya Beli; langkah keempat yaitu menghitung pengeluaran per kapita disesuaikan. Penghitungan rata-rata pengeluaran perkapita dilakukan dalam 3 tahap, yaitu menghitung pengeluaran per kapita (anggota rumah tangga) untuk setiap rumah tangga; menghitung rata-rata pengeluaran per kapita untuk setiap kabupaten/kota; menghitung rata-rata pengeluaran per kapita per tahun dalam ribuan  $Y'_t$  = rata-rata pengeluaran per kapita per bulan  $\times 12/1000$ . Menghitung nilai riil rata-rata pengeluaran perkapita per tahun (atas dasar tahun 2012) dengan rumus:

$$Y_t^* = \frac{Y'_t}{IHK_{(t,2012)}} \times 100$$

Keterangan:

$Y_t^*$  = Rata-rata pengeluaran per kapita per tahun atas dasar harga konstan 2012

$Y'_t$  = Rata-rata pengeluaran per kapita per tahun pada tahun t

$IHK_{(t,2012)}$  = IHK tahun t dengan tahun dasar 2012

Menghitung paritas daya beli dilakukan dengan 3 tahap, yaitu tahap pertama menghitung harga rata-rata komoditas terpilih dengan rumus:

$$P_i = \frac{V_i}{Q_i}$$

Keterangan:

$P_i$  = Rata-rata harga komoditi i per satu satuan di suatu wilayah

$V_i$  = Total value (biaya) yang dikeluarkan untuk komoditi i di suatu wilayah

$Q_i$  = Total kuantum dari komoditi i yang dikonsumsi di suatu wilayah

Untuk harga komoditas yang tidak tercantum dalam modul konsumsi Susenas, data harga diperoleh dari Indeks Harga Konsumen (IHK), dengan rincian sebagai berikut:

1. Perlengkapan mandi
  - a. Pasta gigi
  - b. Sabun mandi
  - c. Shampo
  - d. Sikat gigi
2. Barang habis pakai rumah tangga
  - a. Bola lampu
  - b. Lampu TL/neon
  - c. Korek api gas
  - d. Obat nyamuk bakar
  - e. Pembasmi nyamuk cair
  - f. Pembasmi nyamuk semprot (spray)
  - g. Pembersih lantai
3. Sabun cuci
  - a. Sabun cuci piring
  - b. Sabun krim/detergen
4. Barang kecantikan
  - a. Bedak
  - b. Deodoran
  - c. Body lotion

- d. Lipstik
  - e. Minyak rambut
  - f. Minyak parfum
  - g. Pelembap muka
  - h. Pembersih dan penyegar wajah
- 5. Perawatan kulit, kuku, muka, dan rambut
  - a. Tarif creambath
  - b. Potong rambut pria
  - c. Potong rambut wanita
  - d. Potong rambut anak
- 6. Biaya kesehatan
  - a. Biaya dokter umum
- 7. Pendidikan
  - a. SPP SD
- 8. Transportasi
  - a. Angkutan dalam kota
- 9. Alas kaki
  - a. Sandal kulit pria
- 10. Meubelair
  - a. Meja kursi tamu
- 11. Peralatan rumah tangga
  - a. Lemari es
- 12. Perlengkapan perabot rumah tangga
  - a. Sprei
- 13. Alat dapur/makan
  - a. Kompor

Tahap kedua yaitu menghitung paritas daya beli dengan rumus berikut:

$$Paritas\ Daya\ Beli_j = \prod_{i=1}^m \left( \frac{P_{ij}}{P_{ik}} \right)^{1/m}$$

$P_{ij}$  : harga komoditas i di Jakarta Selatan

$P_{ik}$  : harga komoditas i di kab/kota j

M : jumlah komoditas

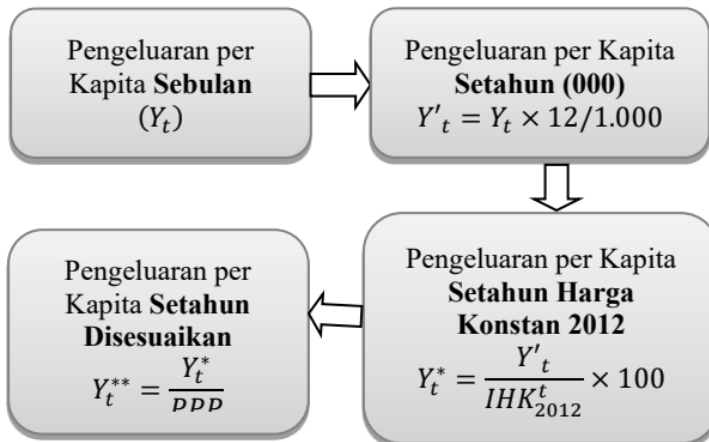
Tahap ketiga yaitu menghitung pengeluaran per kapita disesuaikan dengan rumus berikut:

$$Y_t^{**} = \frac{Y_t^*}{Paritas\ daya\ beli}$$

$Y_t^{**}$  = rata-rata pengeluaran per kapita disesuaikan

$Y_t^*$  = Rata-rata pengeluaran per kapita per tahun atas dasar harga konstan 2012

Ilustrasi penghitungan pengeluaran per kapita:



Rumus Indeks Pendapatan yaitu:

$$I_{pendapatan} = \frac{\ln(pendapatan) - \ln(pendapatan_{min})}{\ln(pendapatan_{maks}) - \ln(pendapatan_{min})}$$

IPM dihitung sebagai rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, indeks pendidikan, dan indeks pengeluaran, yaitu:

$$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}}$$

## 2.7 Konsep dan Definisi Disparitas Pembangunan Manusia dan Reduksi *Shortfall*

Gambaran komprehensif mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan di suatu daerah secara umum dapat dilihat dari angka IPM yang dicapai oleh daerah tersebut. Perkembangan angka IPM dari tahun ke tahun memberikan indikasi peningkatan atau penurunan kinerja pembangunan manusia yang dilaksanakan oleh pemerintah. Namun demikian, untuk menilai keberhasilan pembangunan manusia di suatu daerah tidak mutlak dilihat dari urutan posisi (*ranking*), namun dapat juga dilihat berdasarkan nilai reduksi *shortfall*.

Reduksi *shortfall* ditujukan untuk melihat kemajuan atau kemunduran dari pencapaian sasaran pembangunan manusia di

suatu daerah selama kurun waktu tertentu. Melalui reduksi *shortfall* ini dapat dilihat kecepatan perkembangan IPM suatu daerah. Terdapat sebuah kecenderungan dalam pencapaian IPM, jika nilai IPM semakin mendekati nilai maksimumnya (100), maka pertumbuhannya akan semakin lambat. Sebaliknya jika angka capaian IPM masih berada pada level yang rendah maka kemampuan untuk memacu pertumbuhan yang tinggi dalam capaian IPM akan lebih mudah.

Untuk mengukur kecepatan perkembangan IPM dalam suatu kurun waktu digunakan reduksi shortfall per tahun (*annual reduction in shortfall*). Ukuran ini secara sederhana menunjukkan perbandingan antara capaian yang telah ditempuh dengan capaian yang masih harus ditempuh untuk mencapai titik ideal (IPM=100). Prosedur penghitungan reduksi shortfall IPM (=r; dikutip dari Arizal Ahnaf dkk, 1998;141) dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$r = \left[ \frac{IPM_{t+n} - IPM_t}{IPM_{ideal} - IPM_t} \right]^{1/n}$$

$IPM_t$  = IPM pada tahun t

$IPM_{t+n}$  = IPM pada tahun t + n

$IPM_{ideal} = 100$

# *BAB III*

## *GAMBARAN UMUM WILAYAH*

## BAB III GAMBARAN UMUM WILAYAH

### 3.1 Kondisi Geografi dan Iklim

Kabupaten Jayawijaya merupakan salah satu daerah pegunungan di Papua yang terletak pada posisi 3,45'–4,2' Lintang Selatan serta 138,3'–139,4' Bujur Timur. Secara geografis, wilayah ini berada di lembah pegunungan tengah dengan ketinggian rata-rata 1.550 hingga 1.653 meter di atas permukaan laut. Luas wilayahnya mencapai 13.925,31 km<sup>2</sup>, menjadikan Jayawijaya sebagai salah satu kabupaten dengan wilayah cukup luas di dataran tinggi Papua. Kondisi geografis tersebut memengaruhi iklim yang cenderung sejuk serta topografi yang bergelombang, sehingga menjadi ciri khas kawasan pegunungan tengah Papua.

Perubahan administrasi wilayah Kabupaten Jayawijaya menunjukkan dinamika pembangunan di daerah ini. Pada tahun 2010, wilayah Jayawijaya hanya terdiri dari 11 distrik, yakni Wamena, Asolokobal, Walelagama, Hubikosi, Pelebaga, Asologaima, Musatfak, Kurulu, Bolakme, Wollo, dan Yalengga. Namun, pada tahun 2011 dilakukan pemekaran wilayah sehingga terbentuk 40 distrik dengan 328 kampung. Pemekaran ini bertujuan memperluas jangkauan pelayanan publik, memperpendek rentang kendali pemerintahan, serta memperkuat peran masyarakat di kampung-kampung terpencil.

Ibu kota Kabupaten Jayawijaya terletak di Wamena, yang sekaligus berfungsi sebagai pusat pemerintahan, perekonomian, dan aktivitas sosial budaya masyarakat. Wamena dikenal sebagai kota terbesar di wilayah pegunungan tengah Papua dan menjadi



pintu gerbang utama menuju berbagai distrik di sekitarnya. Dengan kondisi geografis yang dikelilingi pegunungan dan akses transportasi yang sebagian besar masih mengandalkan jalur udara, Wamena memainkan peranan penting dalam distribusi barang, jasa, serta mobilitas penduduk antarwilayah.

Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Jayawijaya memperlihatkan posisinya yang strategis di tengah-tengah kabupaten lain. Di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Mamberamo Tengah, Yalimo, dan Tolikara; sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Nduga dan Yahukimo; di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Nduga dan Lanny Jaya; sedangkan di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Yahukimo dan Yalimo. Letak geografis ini menjadikan Jayawijaya sebagai simpul penting dalam konektivitas antarwilayah pegunungan Papua.

Pada tahun 2024, keadaan iklim Kabupaten Jayawijaya berdasarkan data Stasiun Meteorologi Kelas III Wamena menunjukkan suhu udara rata-rata bulanan berkisar 19,1°C–20,6°C, dengan suhu minimum 12,3°C pada November dan maksimum 30,6°C pada Desember. Kelembaban udara rata-rata cukup tinggi, yakni 82–86% sepanjang tahun dengan puncak 100% pada beberapa bulan. Kecepatan angin rata-rata sekitar 4 knot, dengan maksimum 35 knot pada November. Tekanan udara rata-rata tahunan berada di kisaran 833,9–836,3 mbar, menandakan kondisi atmosfer yang relatif stabil di wilayah pegunungan.

Curah hujan bervariasi setiap bulan, dari 94,6 mm pada Juni hingga 829,2 mm pada Januari, dengan 24–29 hari hujan per

bulan. Penyinaran matahari berkisar 108,3–191,9 jam, tertinggi pada Agustus. Pola ini mencerminkan iklim bercurah hujan tinggi, kelembaban tinggi, dan suhu sejuk sepanjang tahun. Sementara itu, kabupaten pemekaran seperti Nduga, Mamberamo Tengah, dan Yalimo belum memiliki peralatan memadai untuk pemantauan iklim, sehingga data belum tersedia, termasuk data iklim di level kecamatan.

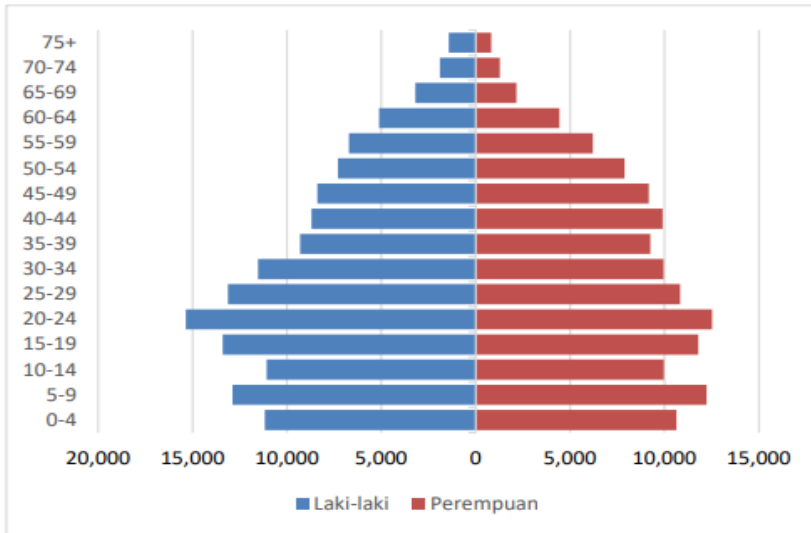
### **3.2 Kependudukan**

Penduduk dalam suatu daerah merupakan potensi sumber daya manusia (SDM) yang dibutuhkan dalam pembangunan, di samping juga sebagai konsumen dalam menikmati hasil pembangunan. Peranan penduduk dalam pembangunan akan berhasil apabila memiliki kemampuan dalam menjawab semua tantangan dalam pembangunan. Jumlah penduduk yang semakin bertambah banyak dan memiliki kualitas yang baik adalah aset yang sangat bermanfaat dalam mendorong laju perekonomian

Jumlah penduduk Kabupaten Jayawijaya hasil Sensus Penduduk pada tahun 2020 adalah 269.553 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 140.584 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 128.969 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,022 persen dari tahun 2019. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin pada tahun 2020 adalah 109,006 yang artinya bahwa penduduk laki-laki lebih banyak 9 hingga 10 persen dibandingkan penduduk perempuan. Upaya pengendalian jumlah penduduk hendaknya terus diupayakan dalam rangka menciptakan tatanan keluarga kecil yang sehat dan

berkualitas. Berikut disajikan komposisi penduduk Kabupaten Jayawijaya tahun 2020 menurut kelompok umur dan jenis kelamin melalui grafik piramida penduduk:

Grafik 3. 1 Piramida Penduduk Kabupaten Jayawijaya Tahun 2020



Sumber: BPS Kab. Jayawijaya, Sensus Penduduk 2020

Dari grafik diatas, dapat diketahui komposisi penduduk Kabupaten Jayawijaya tahun 2020 Penduduk Kabupaten Jayawijaya dapat dikatakan berstruktur umur muda. Hal ini dapat dilihat dari persentase penduduk usia anak-anak (0 – 14 tahun) sebesar 25,21 persen, jumlah penduduk yang berusia produktif (15 – 64 tahun) berjumlah 70,80 persen, dan jumlah penduduk lansia (  $\geq 65$  tahun) tergolong kecil yaitu 3,99 persen. Hal ini merupakan bonus demografi bagi Kabupaten Jayawijaya apabila bisa memanfaatkan struktur penduduk ini dengan kebijakan yang baik dan tepat guna. Komposisi penduduk berstruktur umur

muda ini memberikan implikasi bahwa potensi kelompok umur muda perlu mendapatkan perhatian dan pengembangan sehingga mampu menghasilkan tenaga-tenaga muda yang terampil, mandiri, dan cekatan untuk mengisi dan menciptakan peluang-peluang ekonomi yang tersedia.

Struktur umur penduduk juga digunakan untuk melihat Angka Beban Tanggungan (ABT). Pada tahun 2020 ABT di Kabupaten Jayawijaya sebesar 29,20 persen. Angka ini dapat menyimpulkan bahwa terdapat 29 sampai dengan 30 orang usia tidak produktif yang ditanggung oleh 100 orang penduduk usia produktif di Kabupaten Jayawijaya. ABT tersebut akan memacu penduduk usia produktif untuk meningkatkan kualitas dirinya, yang pada gilirannya akan menjadi modal yang cukup baik mendorong proses pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Jayawijaya.

Tabel 3. 1 Jumlah Penduduk, Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk per Kilometer Persegi, dan Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kabupaten Jayawijaya Menurut Kecamatan, 2024

Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk per km <sup>2</sup>	Rasio Jenis Kelamin Penduduk
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)
WAMENA	61,752	22.35	247.69	117.08%
KURULU	7,215	2.61	14.65	93.69%
ASOLOGAIMA	5,574	2.02	30.56	100.65%
HUBIKOSI	8,100	2.93	14.78	99.41%
BOLAKME	5,355	1.94	12.48	104.70%
WALELAGAMA	3,484	1.26	8.45	101.62%
MUSATFAK	4,482	1.62	4.51	96.49%
WOLO	8,629	3.12	25.4	116.21%

Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk per km <sup>2</sup>	Rasio Jenis Kelamin Penduduk
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)
ASOLOKOBAL	5,678	2.06	15.12	110.45%
PELEBAGA	14,311	5.18	27.83	103.45%
YALENGGA	4,700	1.7	6.82	102.85%
TRIKORA	1,674	0.61	8.81	105.65%
NAPUA	5,576	2.02	22.61	102.76%
WALAIK	3,457	1.25	19.61	100.52%
WOUMA	7,793	2.82	32.06	110.05%
HUBIKIAK	14,086	5.1	26	104.92%
IBELE	9,105	3.3	27.33	113.88%
TAELAREK	3,570	1.29	11.13	106.48%
ITLAY HISAGE	4,335	1.57	8.69	98.49%
SIEPKOSI	3,836	1.39	10.81	97.63%
USILIMO	3,965	1.44	12.33	93.51%
WITA WAYA	2,333	0.84	10.74	92.49%
LIBAREK	2,471	0.89	11.59	93.05%
WADANGKU	2,465	0.89	11.21	116.99%
PISUGI	3,642	1.32	10.84	95.81%
KORAGI	3,615	1.31	7.76	115.05%
TAGIME	5,931	2.15	14.6	112.81%
MOLAGALOME	2,705	0.98	11.83	108.88%
TAGINERI	3,724	1.35	12.77	109.10%
SILO KARNO DOGA	5,306	1.92	17.13	96.23%
PIRAMID	5,809	2.1	19.55	108.06%
MULIAMA	6,452	2.34	19.1	86.64%
BUGI	4,041	1.46	8.71	142.41%
BPIRI	1,799	0.65	5.17	101.68%
WALESI	3,372	1.22	13.48	101.31%
ASOTIPO	9,980	3.61	31.23	107.61%
MAIMA	6,623	2.4	35.11	107.62%
POPUGOBA	6,337	2.29	39.53	100.54%
WAME	2,135	0.77	12.7	107.48%

Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk per km <sup>2</sup>	Rasio Jenis Kelamin Penduduk
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)
WESAPUT	10,871	3.93	43.6	108.82%
Jayawijaya	276,288	100		

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Jayawijaya

Jumlah penduduk Kabupaten Jayawijaya pada tahun 2024 mencapai 276.288 jiwa dengan sebaran yang tidak merata antar kecamatan. Kecamatan Wamena menjadi wilayah dengan jumlah penduduk terbesar, yaitu 61.752 jiwa atau sekitar 22,35 persen dari total populasi. Konsentrasi ini wajar karena Wamena merupakan pusat pemerintahan, perdagangan, dan pelayanan publik. Di sisi lain, terdapat kecamatan dengan jumlah penduduk jauh lebih kecil seperti Trikora dengan 1.674 jiwa, Bpiri 1.799 jiwa, dan Wame 2.135 jiwa yang kontribusinya kurang dari satu persen. Hal ini memperlihatkan adanya ketimpangan distribusi penduduk di Jayawijaya, di mana sebagian besar terkonsentrasi di pusat kota sementara wilayah lain masih jarang penduduk.

Kepadatan penduduk pun menunjukkan variasi yang cukup besar. Wamena menempati posisi tertinggi dengan 247,69 jiwa per kilometer persegi, mencerminkan padatnya wilayah perkotaan. Beberapa kecamatan lain yang juga memiliki kepadatan tinggi adalah Wesaput dengan 43,6 jiwa per kilometer persegi, Popugoba 39,53 jiwa per kilometer persegi, serta Maima 35,11 jiwa per kilometer persegi. Sebaliknya, terdapat kecamatan dengan kepadatan sangat rendah seperti Musatfak yang hanya 4,51 jiwa per kilometer persegi. Angka-angka ini menandakan

bahwa topografi pegunungan dan kondisi geografis yang sulit turut memengaruhi pola pemukiman yang cenderung tersebar.

Dari sisi rasio jenis kelamin, data menunjukkan adanya kecenderungan jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibanding perempuan di sebagian besar kecamatan. Kecamatan Bugi mencatat rasio tertinggi dengan 142,41 persen, yang berarti dominasi laki-laki cukup besar di wilayah tersebut. Rasio tinggi juga terlihat di Wamena dengan 117,08 persen, Wolo 116,21 persen, dan Wadanku 116,99 persen. Sebaliknya, Muliama justru memiliki rasio rendah sebesar 86,64 persen yang menunjukkan perempuan lebih banyak dibanding laki-laki. Variasi rasio jenis kelamin ini dapat dipengaruhi oleh faktor migrasi, pekerjaan, maupun struktur sosial masyarakat setempat.

Secara keseluruhan, gambaran kependudukan Jayawijaya tahun 2024 memperlihatkan adanya konsentrasi penduduk di wilayah perkotaan, perbedaan kepadatan antar kecamatan yang cukup ekstrem, serta ketidakseimbangan rasio jenis kelamin di beberapa wilayah. Kondisi ini memberikan implikasi penting bagi perencanaan pembangunan daerah, terutama dalam penyediaan layanan publik, pemerataan pembangunan, serta perencanaan demografi jangka panjang. Data ini menjadi dasar yang kuat untuk merumuskan strategi pembangunan yang lebih adil dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing kecamatan.





# *BAB IV*

## *ANALISIS*

## BAB IV ANALISIS

### 4.1 Perkembangan IPM Kabupaten Jayawijaya Tahun 2020–2024

Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1990 dan metode penghitungan direvisi pada tahun 2010. BPS mengadopsi perubahan metodologi penghitungan IPM yang baru pada tahun 2015 dan melakukan backcasting sejak tahun 2010.

IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (a long and healthy life), pengetahuan (knowledge) dan standar hidup layak (decent standard of living). Umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Angka Harapan Hidup (AHH) yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi. Pengetahuan diukur melalui indikator Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah

formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Standar hidup layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli.

IPM merupakan indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan dalam jangka panjang. Untuk menilai kemajuan pembangunan manusia, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu kecepatan dan status pencapaian. Secara umum, pembangunan manusia di Kabupaten Jayawijaya terus mengalami peningkatan dari tahun 2020 hingga 2024.

IPM Kabupaten Jayawijaya tercatat sebesar 58,03 pada tahun 2020, kemudian naik menjadi 58,67 pada tahun 2021, meningkat lagi menjadi 59,60 pada tahun 2022, dan mencapai 60,50 pada tahun 2023. Pada tahun 2024, IPM Jayawijaya mencapai 61,03. Selama periode 2020–2024, IPM Kabupaten Jayawijaya meningkat sebesar 3,00 poin, yang mencerminkan adanya perbaikan berkelanjutan dalam kualitas hidup masyarakat.

Khusus pada periode 2023–2024, peningkatan IPM sebesar 0,53 poin, lebih kecil dibandingkan kenaikan pada periode 2022–2023 yang mencapai 0,90 poin, dan periode 2021–2022 yang naik 0,93 poin. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun tren kenaikan masih berlanjut, laju pertumbuhan relatif melambat. Hingga saat ini, status pembangunan manusia Kabupaten Jayawijaya masih berada pada kategori “sedang”, yang konsisten sejak tahun 2020.

Grafik 4. 1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Jayawijaya, 2020-2024



Sumber: BPS Kab. Jayawijaya

#### 4.1.1 Pertumbuhan IPM

Pertumbuhan IPM digunakan untuk mengukur kecepatan perkembangan IPM dalam suatu kurun waktu. Pertumbuhan IPM menunjukkan perbandingan antara pencapaian yang telah ditempuh dengan capaian sebelumnya. Nilai pertumbuhan IPM yang positif berarti IPM mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya dan semakin tinggi nilai pertumbuhan, maka semakin cepat IPM suatu wilayah untuk mencapai nilai maksimalnya.

Grafik 4. 2 Perkembangan Pertumbuhan IPM Kabupaten Jayawijaya, 2020-2024



Sumber: BPS Kab. Jayawijaya

Selama kurun waktu lima tahun terakhir (2020–2024), persentase pertumbuhan IPM di Kabupaten Jayawijaya menunjukkan tren yang fluktuatif, dengan nilai yang bervariasi dari tahun ke tahun. Pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2020 yaitu hanya sebesar 0,42 persen, sedangkan pertumbuhan tertinggi dicapai pada tahun 2022 sebesar 1,59 persen. Sementara itu, pada tahun 2021 pertumbuhan IPM tercatat 1,10 persen, kemudian sedikit menurun menjadi 1,51 persen pada tahun 2023, dan kembali turun ke 0,88 persen pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun IPM Jayawijaya terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun kecepatan pertumbuhan masih belum stabil. Diharapkan pada tahun-tahun mendatang laju pertumbuhan IPM dapat lebih konsisten dan cenderung meningkat, sehingga kualitas pembangunan manusia di Kabupaten Jayawijaya semakin baik.

## 4.2 Pencapaian Pembangunan Kapabilitas Dasar Manusia

Pencapaian pembangunan manusia diukur dengan memperhatikan tiga aspek esensial yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Oleh karena itu, peningkatan capaian IPM tidak terlepas dari peningkatan setiap komponennya. Seiring dengan meningkatnya angka IPM, indeks masing-masing komponen IPM juga menunjukkan kenaikan dari tahun ke tahun.

Tabel 4. 1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Jayawijaya Menurut Komponen, 2020-2024

Komponen	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Angka Harapan Hidup saat Lahir (Tahun)	59.64	59.9	60.26	60.5	60.65
Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12.27	12.53	12.83	12.84	12.85
Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	5.51	5.6	5.74	5.98	5.99
Pengeluaran per Kapita (Ribu)	7441	7545	7765	8159	8534
IPM	58.03	58.67	59.6	60.5	61.03
Pertumbuhan IPM (%)	0.42%	1.10%	1.59%	1.51%	0.88%

Sumber: BPS Kab.Jayawijaya

Dari tabel di atas terlihat bahwa setiap komponen penyusun IPM Kabupaten Jayawijaya pada periode 2020–2024 mengalami peningkatan secara konsisten. Angka Harapan Hidup saat Lahir menunjukkan tren perbaikan yang mencerminkan semakin baiknya kondisi kesehatan masyarakat. Demikian pula pada dimensi pendidikan, baik Harapan Lama Sekolah maupun Rata-rata Lama Sekolah terus meningkat dari tahun ke tahun, menandakan adanya perluasan akses pendidikan serta peningkatan partisipasi sekolah. Dari sisi ekonomi, pengeluaran per kapita juga terus bertambah yang mengindikasikan adanya perbaikan tingkat kesejahteraan masyarakat. Secara keseluruhan, kenaikan nilai IPM dari 58,03 pada tahun 2020 menjadi 61,03 pada tahun 2024 merupakan sinyal positif atas keberhasilan pembangunan manusia yang lebih inklusif.

Namun demikian, meskipun capaian tersebut menunjukkan perkembangan yang menggembirakan, angka yang diperoleh masih relatif rendah dibandingkan target pembangunan jangka panjang. Pertumbuhan IPM yang cenderung fluktuatif dan relatif kecil setiap tahunnya menunjukkan adanya tantangan yang masih harus dihadapi. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mengambil langkah-langkah strategis, baik melalui peningkatan kualitas layanan kesehatan, penguatan mutu pendidikan, maupun pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kebijakan pembangunan yang terintegrasi, berkelanjutan, serta berorientasi pada pemerataan diharapkan dapat mendorong kenaikan IPM secara lebih signifikan sehingga mampu mempercepat pencapaian kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Jayawijaya.

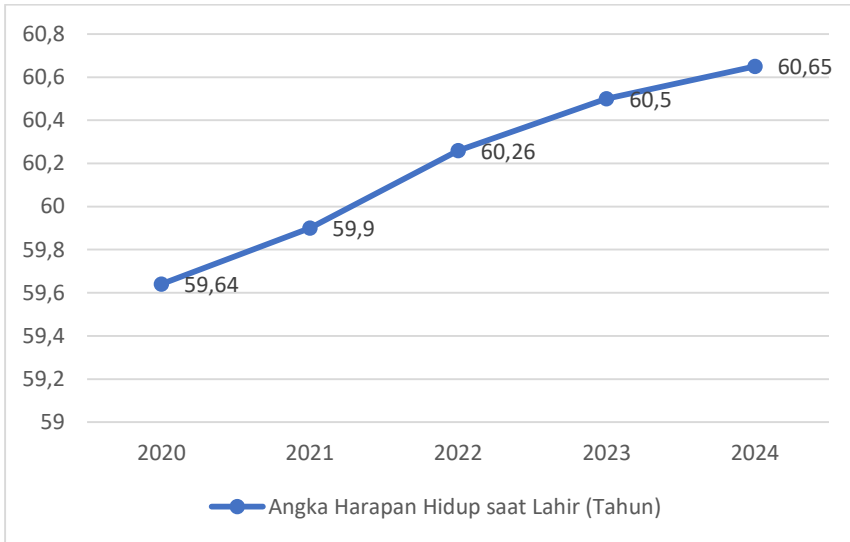
#### **4.2.1 Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat**

Angka Harapan Hidup (AHH) saat lahir di Kabupaten Jayawijaya terus menunjukkan peningkatan dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, bayi yang baru lahir memiliki peluang hidup hingga 59,64 tahun, kemudian meningkat menjadi 59,90 tahun di tahun 2021, 60,26 tahun pada tahun 2022, 60,50 tahun di tahun 2023, dan mencapai 60,65 tahun pada tahun 2024. Dengan demikian, dalam kurun lima tahun terakhir terjadi kenaikan sebesar 1,01 tahun yang menggambarkan adanya perbaikan kesehatan masyarakat secara bertahap.

Meskipun peningkatan tersebut relatif kecil setiap tahunnya, hal ini tetap menunjukkan adanya kemajuan dalam upaya pembangunan kesehatan di Jayawijaya. Dengan rata-rata usia harapan hidup mencapai 60 hingga 61 tahun, masyarakat Jayawijaya sudah berada pada kategori sedang jika dibandingkan dengan standar harapan hidup maksimal 85 tahun. Capaian ini sekaligus menegaskan bahwa masih dibutuhkan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas kesehatan melalui perbaikan pelayanan medis, gizi masyarakat, serta lingkungan hidup yang lebih sehat.



Grafik 4. 3 Angka Harapan Hidup (AHH) Saat Lahir di Kabupaten Jayawijaya (tahun), 2020-2024



Sumber: BPS Kab. Jayawijaya

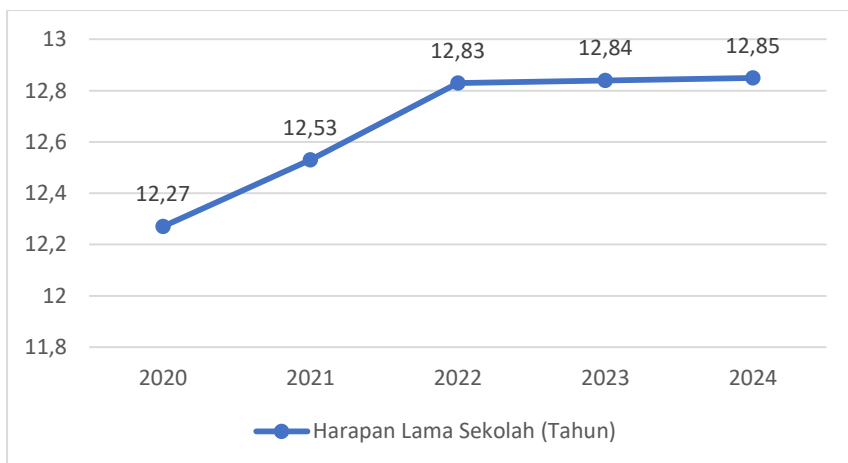
#### 4.2.2 Dimensi Pengetahuan

Dimensi pengetahuan pada IPM di Kabupaten Jayawijaya terus mengalami perkembangan positif sepanjang periode 2020 hingga 2024. Harapan Lama Sekolah meningkat dari 12,27 tahun pada 2020 menjadi 12,85 tahun pada 2024, sehingga dalam kurun lima tahun terjadi tambahan sebesar 0,58 tahun. Rata-rata peningkatan setiap tahunnya memang kecil, namun konsisten, menandakan adanya perbaikan akses masyarakat terhadap pendidikan di wilayah ini.

Pada tahun 2024, Harapan Lama Sekolah mencapai 12,85 tahun, naik tipis 0,01 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Angka ini menunjukkan bahwa anak-anak usia 7 tahun di

Kabupaten Jayawijaya memiliki peluang untuk mengenyam pendidikan hingga tingkat sekolah menengah atas, bahkan berlanjut ke perguruan tinggi. Peningkatan berkelanjutan ini menjadi sinyal positif bahwa semakin banyak penduduk yang mendapatkan kesempatan bersekolah dan mengakses layanan pendidikan.

Grafik 4. 4 Perkembangan Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Jayawijaya, 2020-2024



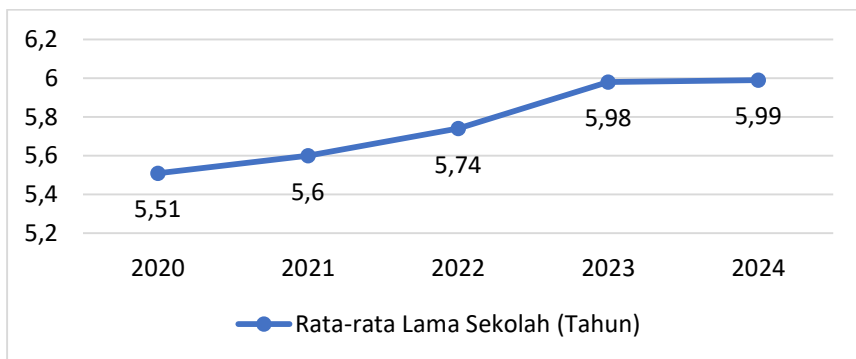
Sumber: BPS Kab. Jayawijaya

Selain indikator Harapan Lama Sekolah, terdapat juga indikator Rata-rata Lama Sekolah. Meskipun nilainya selalu meningkat setiap tahunnya, peningkatan RLS di Kabupaten Jayawijaya masih terbilang sangat kecil. Akan tetapi pertumbuhan yang positif ini merupakan modal penting dalam membangun kualitas manusia di Kabupaten Jayawijaya yang lebih baik, dimana hingga tahun 2023 rata-rata lama sekolah yang sudah ditempuh penduduk usia 25 tahun ke atas adalah 5,98 tahun. Yang artinya,

secara rata-rata penduduk Kabupaten Jayawijaya usia 25 tahun ke atas telah mengenyam pendidikan hingga kelas 5 SD. Merujuk hal di atas boleh dibilang bahwa umumnya pendidikan dasar 6 tahun di Jayawijaya belum terlaksana. Oleh karena itu, sudah selayaknya pembangunan di bidang pendidikan menjadi prioritas utama.

Karena pendidikan pada dasarnya merupakan modal bagi penduduk dalam upaya meningkatkan mutu dan kualitas sumber daya manusia. Jika kondisinya saja sudah jauh dari yang diharapkan, tentunya akan berdampak pada pembangunan yang lain.

Grafik 4. 5 Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Jayawijaya, 2020-2024



Sumber: BPS Kab. Jayawijaya

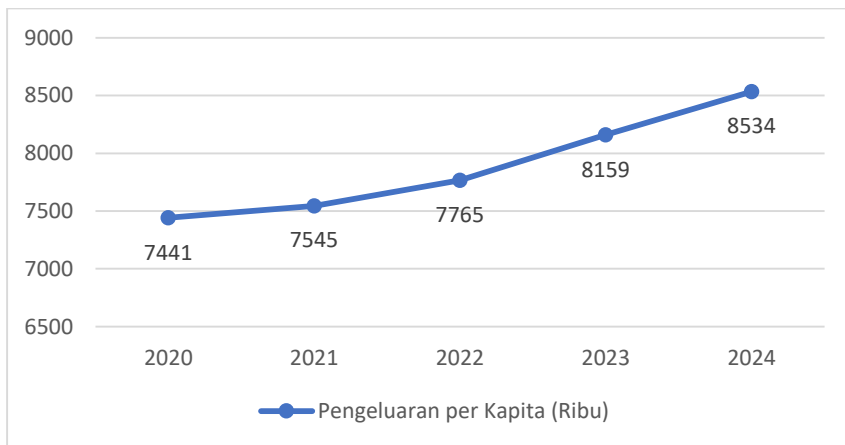
#### 4.2.3 Dimensi Standar Hidup Layak

Dimensi terakhir yang mencerminkan kualitas hidup manusia adalah standar hidup yang diukur melalui pengeluaran per kapita. Indikator ini menunjukkan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari, baik pangan maupun nonpangan. Di Kabupaten Jayawijaya, pengeluaran per kapita

terus meningkat dari Rp7.441.000 per tahun pada 2020 menjadi Rp8.534.000 per tahun pada 2024. Selama lima tahun terakhir, terjadi kenaikan sebesar Rp1.093.000 yang menggambarkan adanya peningkatan daya beli dan taraf hidup masyarakat.

Kenaikan pengeluaran per kapita tersebut juga mencerminkan perbaikan kesejahteraan serta semakin luasnya akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar. Tren positif ini sejalan dengan upaya pembangunan daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperbaiki kualitas hidup penduduk, meskipun pemerataan hasil pembangunan masih menjadi tantangan penting di Jayawijaya.

Grafik 4. 6 Perkembangan Pengeluaran per Kapita di Kabupaten Jayawijaya, 2010-2024



Sumber: BPS Kab. Jayawijaya

## **4.3 Indikator Kesehatan, Pendidikan dan Perekonomian Kabupaten Jayawijaya**

### **4.3.1 Indikator Kesehatan**

Tujuan dari pembangunan manusia di bidang kesehatan adalah untuk mencapai umur panjang yang sehat. Masyarakat yang sehat tentunya didukung oleh sarana dan prasarana kesehatan yang memadai. Juga tentunya dipengaruhi oleh perilaku kebiasaan masyarakat itu sendiri. Program pembangunan kesehatan oleh pemerintah diarahkan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang memiliki derajat kualitas hidup yang tinggi, serta memiliki kesadaran akan pentingnya hidup sehat. Oleh sebab itu indikator kesehatan menjadi sangat penting untuk menggambarkan mutu pembangunan manusia di suatu wilayah. Semakin baik tingkat kesehatan penduduk maka semakin baik modal pembangunannya.

Secara umum, sistem kesehatan nasional menunjukkan adanya peningkatan, termasuk di Kabupaten Jayawijaya. Jumlah tenaga kesehatan pada tahun 2024 masih relatif besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, meskipun terjadi penurunan jumlah dokter dan perawat dibanding 2023. Di sisi lain, jumlah fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan pustu tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan masih belum sebanding dengan kebutuhan masyarakat. Pada tahun 2024, jumlah penduduk Kabupaten Jayawijaya mencapai 276.288 jiwa, sehingga diperlukan upaya peningkatan layanan kesehatan baik dari segi tenaga maupun

fasilitas untuk menjawab tantangan pertumbuhan penduduk tersebut.

Tabel 4. 2 Fasilitas dan Tenaga Kesehatan di Kabupaten Jayawijaya, 2022 - 2024

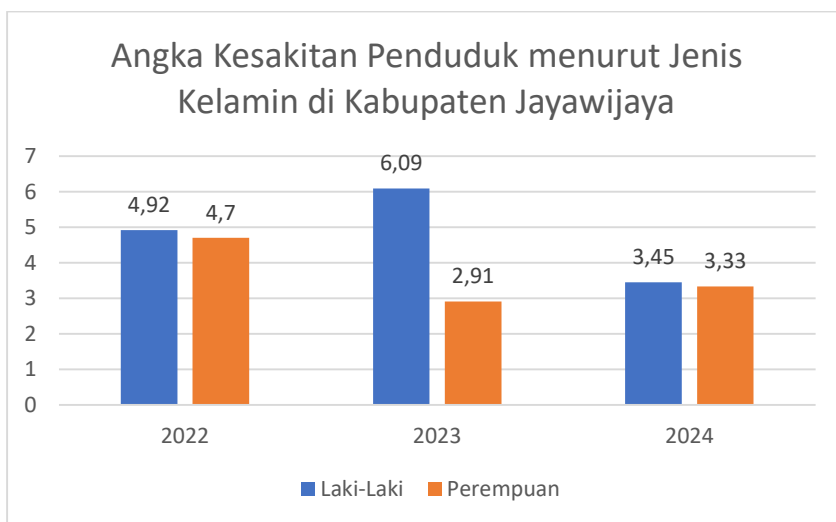
Fasilitas/ Tenaga Kesehatan	2022		2023		2024	
	Jumlah	Rasio Terhadap Penduduk	Jumlah	Rasio Terhadap Penduduk	Jumlah	Rasio Terhadap Penduduk
Rumah Sakit	1	277923	1	278180	1	276288
Puskesmas	26	10689	30	9273	39	7084
Pustu	37	7511	37	7518	37	7467
Dokter	63	4411	77	3613	21	13157
Perawat	333	834	424	656	173	1597

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Jayawijaya, BPS Jayawijaya, dan Disdukcapil Kabupaten Jayawijaya

Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dapat diukur dari tingkat mortalitas dan morbiditas penduduknya. Secara garis besar, tingkat morbiditas mencerminkan angka kesakitan yang dialami oleh penduduk. Morbiditas menunjukkan adanya gangguan atau keluhan kesehatan yang mengakibatkan terganggunya aktivitas sehari-hari baik dalam melakukan pekerjaan, bersekolah, mengurus rumah tangga maupun melakukan aktivitas lainnya. Pada umumnya keluhan kesehatan yang biasa dialami penduduk antara lain: panas, batuk, pilek, asma/sesak nafas, diare, sakit kepala berulang, sakit gigi dan campak. Semakin banyak penduduk yang mengalami gangguan kesehatan, semakin tinggi nilai morbiditas dan berarti semakin rendah derajat kesehatan di wilayah tersebut.

Angka morbiditas penduduk diperoleh dari Susenas pada rincian pertanyaan mengenai keluhan kesehatan yang dialami selama satu bulan sebelum pencacahan. Meskipun pada saat pencacahan, petugas susenas tidak dibarengi dengan petugas kesehatan, namun dari pengakuan responden mengenai keluhan kesehatan sudah dianggap representatif untuk menggambarkan keluhan dari suatu indikasi penyakit yang sudah sangat umum.

Grafik 4. 7 Angka Kesakitan Penduduk menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Jayawijaya, 2022-2024



Sumber: BPS, Susenas 2024

Berdasarkan data angka kesakitan penduduk menurut jenis kelamin di Kabupaten Jayawijaya pada periode 2022–2024, terlihat adanya variasi yang cukup signifikan. Pada tahun 2022, angka kesakitan penduduk laki-laki tercatat sebesar 4,92 poin dan meningkat menjadi 6,09 poin di tahun 2023, namun kemudian menurun tajam menjadi 3,45 poin pada tahun 2024. Hal ini

menunjukkan adanya fluktuasi yang cukup besar dalam kesehatan penduduk laki-laki, dengan kecenderungan penurunan pada tahun terakhir pengamatan.

Sementara itu, penduduk perempuan menunjukkan pola yang berbeda. Pada tahun 2022 angka kesakitan perempuan sebesar 4,70 poin, lalu menurun menjadi 2,91 poin pada tahun 2023, dan kembali sedikit naik ke 3,33 poin di tahun 2024. Perubahan ini menggambarkan bahwa kesehatan penduduk perempuan cenderung membaik pada 2023, meskipun pada tahun berikutnya terjadi kenaikan kembali walau tidak sebesar kondisi awal. Secara umum, dinamika ini mengindikasikan adanya perbedaan tren kesehatan antara laki-laki dan perempuan yang perlu menjadi perhatian dalam perumusan kebijakan kesehatan daerah.

Hal yang juga menentukan derajat kesehatan penduduk adalah tingkat kesehatan balita diantaranya terkait pemberian Air Susu Ibu (ASI) dan imunisasi. ASI dipercaya sebagai nutrisi terbaik untuk bayi, terutama bayi yang baru lahir dan dianjurkan untuk terus diberikan hingga usia dua tahun. Hal ini karena kandungan nutrisi dalam ASI yang unik, spesifik dan kompleks dengan komponen imunologis dan komponen pemacu pertumbuhan. Bayi yang diberikan ASI (setidaknya selama enam bulan) memiliki penurunan resiko terhadap berbagai penyakit dan kematian bayi.



Tabel 4. 3 Persentase Anak Usia Kurang dari 2 Tahun yang Pernah diberi ASI dan Lamanya Pemberian ASI di Kabupaten Jayawijaya, 2022-2024

Indikator	2022	2023	2024
Pernah diberi ASI (persen)	100	80.79	83.98
Rata-rata pemberian ASI (bulan)	11.6	16.85	10.1

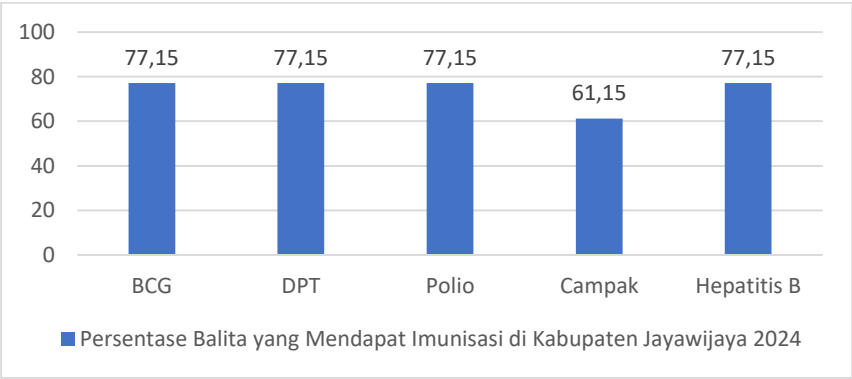
Sumber: BPS Kabupaten Jayawijaya, Susenas

Dari tabel 4.3 dapat dilihat bahwa persentase anak usia kurang dari dua tahun yang pernah diberi ASI di Kabupaten Jayawijaya menunjukkan fluktuasi pada periode 2022–2024. Pada tahun 2022, persentase baduta yang pernah diberi ASI tercatat mencapai 100 persen. Namun pada tahun 2023 angka tersebut turun drastis menjadi 80,79 persen sebelum kembali sedikit meningkat pada tahun 2024 sebesar 83,98 persen. Kondisi ini menggambarkan bahwa meskipun mayoritas anak masih mendapatkan ASI, cakupan pemberiannya belum stabil dan cenderung menurun dibanding tahun awal periode.

Rata-rata lamanya pemberian ASI juga mengalami perubahan cukup signifikan. Pada tahun 2022, lamanya pemberian ASI rata-rata adalah 11,60 bulan, meningkat cukup tajam pada tahun 2023 menjadi 16,85 bulan. Namun, pada tahun 2024 angka tersebut kembali turun menjadi 10,10 bulan. Fluktuasi ini menunjukkan bahwa praktik pemberian ASI masih menghadapi tantangan dalam mempertahankan durasi pemberian sesuai rekomendasi kesehatan, yaitu selama 24 bulan penuh.

Sementara itu jika dilihat dari aspek pemberian imunisasi, secara umum lebih dari setengah balita di Jayawijaya telah mendapat imunisasi. Imunisasi sangat penting diberikan kepada balita sebagai langkah pencegahan penyakit. Oleh karena itu, memperluas jangkauan imunisasi kepada seluruh balita menjadi pekerjaan rumah yang harus disegerakan pencapaiannya. Capaian imunisasi Jayawijaya pada tahun 2024 berdasarkan jenis imunisasi BCG, Polio, DPT, Hepatitis B, dan Campak/MMR masing-masing sebanyak 77,15 persen; 77,15 persen; 77,15 persen; 77,15 persen; dan 61,15 persen.

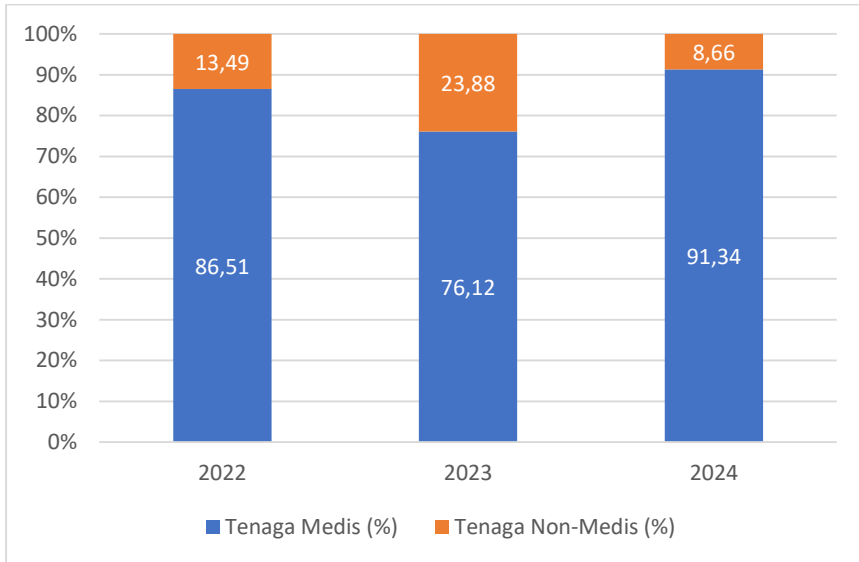
Grafik 4. 8 Persentase Balita yang Mendapat Imunisasi di Kabupaten Jayawijaya, 2024



Sumber: BPS, Susenas 2024

Penyebab tingginya angka kematian bayi selain karena masalah infeksi/penyakit dan berat bayi lahir rendah, juga berkaitan erat dengan kondisi pada fase kehamilan, pertolongan kelahiran yang aman dan perawatan bayi pada saat dilahirkan. Berikut persentase perempuan 25-49 tahun yang pernah kawin dan penolong proses kelahiran terakhir di kabupaten Jayawijaya:

Grafik 4. 9 Persentase Perempuan 15-49 Tahun yang Pernah Kawin dan Penolong Proses Kelahiran Terakhir Kabupaten Jayawijaya, 2022 - 2024



Sumber: BPS, Susenas

Penolong kelahiran oleh tenaga medis di Kabupaten Jayawijaya tergolong cukup baik. Data Susenas 2022 mencatat bahwa banyaknya kelahiran yang ditolong tenaga medis berada pada angka 86,51 persen, sedangkan sisanya sebesar 13,49 persen dibantu oleh tenaga non-medis seperti dukun beranak atau keluarga. Sebagian wilayah geografis Jayawijaya berupa pegunungan dengan jarak rumah menuju layanan kesehatan seperti puskesmas relatif sangat jauh. Hal ini menyebabkan sebagian ibu melahirkan di rumah dengan bantuan keluarga, yang berpotensi meningkatkan risiko kematian ibu dan bayi karena persalinan tidak tertangani secara medis.

Pada tahun 2023, angka persalinan dengan tenaga medis menurun menjadi 76,12 persen dan penolong non-medis naik menjadi 23,88 persen. Namun, pada tahun 2024 terjadi perbaikan signifikan, di mana 91,34 persen kelahiran ditangani tenaga medis dan hanya 8,66 persen yang masih ditolong oleh tenaga non-medis. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan akses maupun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya melahirkan di fasilitas kesehatan.

Faktor lain yang juga mempengaruhi derajat kesehatan penduduk yaitu kondisi kesehatan lingkungan seperti akses rumah tangga terhadap air bersih dan sanitasi layak. Akses penduduk terhadap ketersediaan air bersih, baik itu untuk minum maupun aktivitas lain seperti mandi, mencuci, dan lain-lain tidak kalah penting sebagai penentu tingkat kesehatan penduduk.

Tabel 4. 4 Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Utama yang Digunakan Untuk Mandi/Cuci/dll di Kabupaten Jayawijaya, 2024

Karakteristik	Jayawijaya (Total)
Air Kemasan/Bermerk/Air Isi Ulang/Leding (%)	NA
Sumur/Pompa/Sumur Terlindung/Mata Air Terlindung/Air Hujan (%)	40,42
Lainnya (%)	58,53
Jumlah (%)	100

Sumber: BPS, Susenas 2024

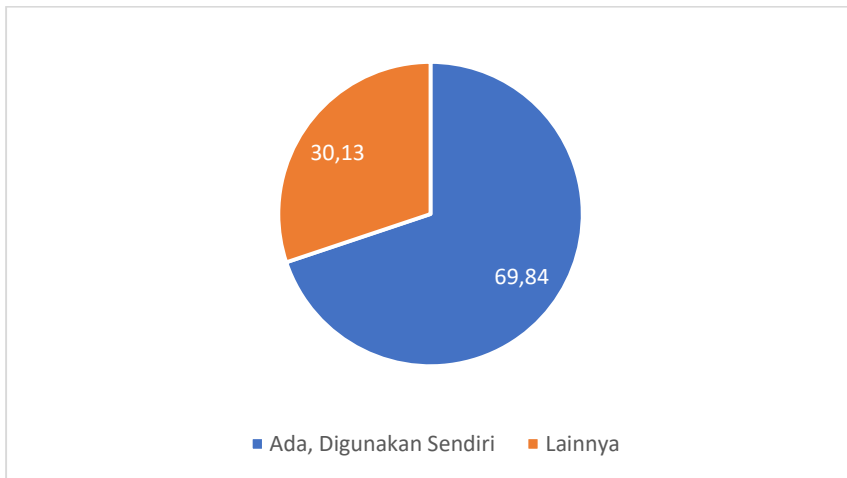
NA : Nilai tidak dapat ditampilkan, RSE > 50%

Sesuai konsep yang digunakan dalam Susenas, sumber air dikatakan bersih jika air bersumber dari air kemasan, air ledeng, air bor/pompa, air sumur terlindung, dan mata air terlindung yang jaraknya lebih dari 10 m dari pembuangan limbah terdekat. Air bersih menurut konsep di sini adalah yang digunakan untuk minum. Dalam satu hari seseorang membutuhkan air minum rata-rata 1,5 liter (sekitar 8 gelas). Artinya jika satu rumah tangga terdiri dari 4 orang anggota (ayah, ibu, dan 2 orang anak) maka dalam satu hari rumah tangga tersebut membutuhkan sedikitnya 6 liter air untuk keperluan minum. Jika kondisi air yang diminum tersebut tidak mempunyai syarat cukup “air bersih”, maka akan mengakibatkan gangguan kesehatan bagi peminumnya.

Selain akses terhadap air bersih, salah satu kebutuhan penting dalam tempat tinggal adalah tersedianya fasilitas sanitasi seperti fasilitas buang air besar (jamban). Rumah tangga cenderung akan memilih tempat tinggal yang memiliki jamban sendiri karena lebih terjaga kebersihannya.

Memiliki fasilitas jamban sendiri dalam rumah tempat tinggal merefleksikan perspektif kesejahteraan maupun kelestarian lingkungan yang lebih baik, sedangkan jamban umum (di sungai/kali atau di tempat-tempat umum lainnya) dan tidak menggunakan jamban (seperti BAB di kebun/ladang/hutan dan sejenisnya) berimplikasi pada kelestarian lingkungan. Semakin banyak masyarakat membuang air besar di sungai atau kebun akan semakin besar efeknya terhadap sanitasi lingkungan.

Grafik 4. 10 Persentase Rumah Tangga Menurut Fasilitas Tempat BAB di Kabupaten Jayawijaya, 2024

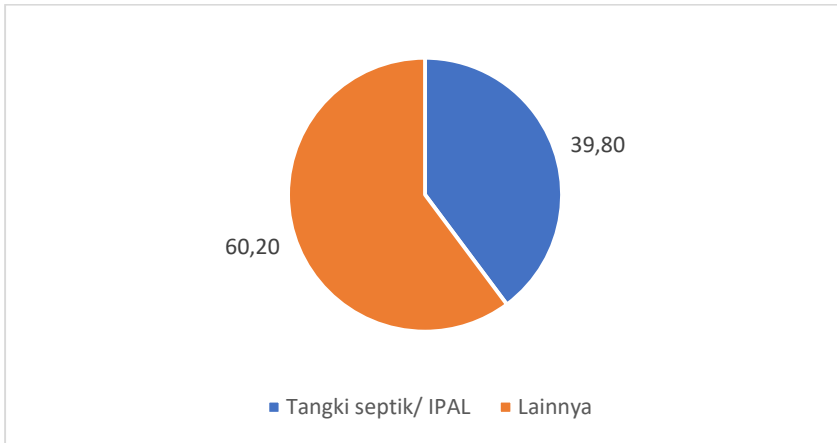


Sumber: BPS, Susenas 2024

Gambar di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2024 sebesar 69,84 persen rumah tangga di Jayawijaya memiliki fasilitas jamban sendiri; sebesar 30,13 persen termasuk menggunakan fasilitas jamban umum/komunal dan tidak memiliki fasilitas jamban. Untuk wilayah perdesaan lebih dari setengah rumah tangganya membuang air besar di kebun/ladang/hutan dan sejenisnya.

Penggunaan jamban sendiri atau bersama dengan tangki septik merupakan indikator fasilitas rumah tinggal yang cukup penting dalam mendukung tersedianya sanitasi layak. Akses ke fasilitas sanitasi yang memadai merupakan dasar mengurangi resiko penyakit yang ditimbulkan oleh tinja seperti diare pada anak-anak.

Grafik 4. 11 Persentase Rumah Tangga Menurut Tempat Pembuangan Akhir Tinja di Kabupaten Jayawijaya, 2024



Sumber: BPS, Susenas 2024

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa, sebagian besar rumah tangga sudah menggunakan tangki septik/IPAL/SPAL meskipun jamban yang digunakan bukan milik sendiri. Persentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak, yakni rumah tangga yang menggunakan jamban baik sendiri maupun bersama dengan pembuangan akhir berupa tangki septik/SPAL, yaitu sebesar 39,80 persen; sedangkan 60,20 persen rumah tangga lainnya menggunakan tempat pembuangan akhir tinja lainnya seperti lubang tanah, sungai, dll

Minimnya fasilitas air bersih dan sanitasi layak di Jayawijaya perlu segera ditindaklanjuti oleh pemerintah, karena kejadian diare khususnya pada balita dan penyakit mematikan lainnya sangat erat kaitannya dengan tersedianya sanitasi yang layak dan kebersihan.

### 4.3.2 Indikator Pendidikan

Peningkatan kualitas penduduk diperlukan supaya penduduk tidak menjadi beban bagi pembangunan, tetapi justru dapat menjadi aset pembangunan. Pendidikan sebagai instrumen penting dalam pembangunan ekonomi dan sosial, yang juga merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sebagai salah satu hak asasi manusia, pemenuhan kebutuhan terhadap pendidikan bagi setiap penduduk Indonesia dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28C ayat 1. Yang berbunyi bahwa “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

Informasi maupun gambaran mengenai situasi dan kondisi pendidikan di Kabupaten Jayawijya diperlukan sebagai bahan evaluasi pembangunan manusia. Informasi tersebut juga diharapkan dapat mendukung sistem pendidikan nasional serta strategi dan arah kebijakan pembangunan pendidikan nasional yang paling efektif dan efisien untuk diterapkan di Kabupaten Jayawijya. Hasil pembangunan pendidikan dapat dilihat melalui beberapa indikator seperti angka melek huruf, tingkat partisipasi sekolah, pendidikan tertinggi yang ditamatkan, serta kualitas pelayanan pendidikan.

#### A. Angka Melek Huruf

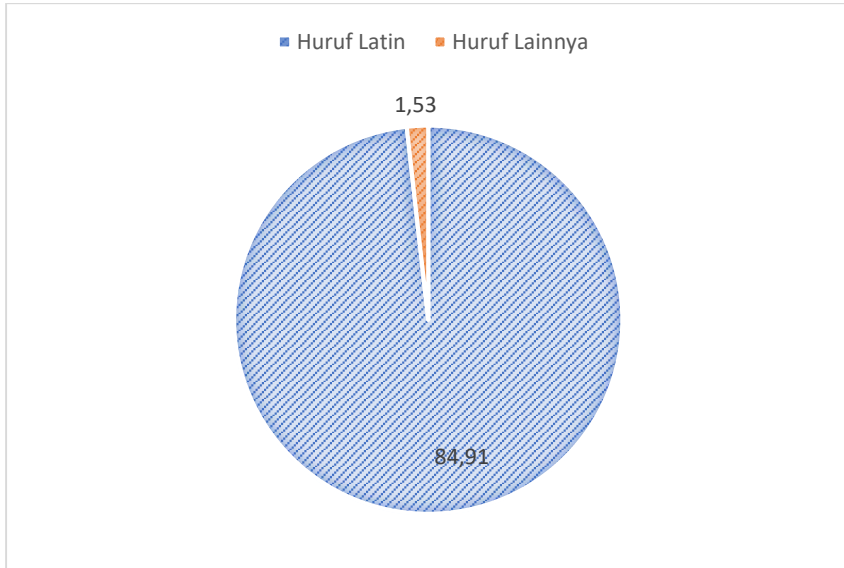
Melek huruf merupakan kemampuan untuk mengidentifikasi, mengerti, menerjemahkan,



membuat, mengkomunikasikan dan mengolah isi dari rangkaian teks yang terdapat pada bahan-bahan cetak dan tulisan yang berakitan dengan berbagai situasi (UNESCO). Angka Melek Huruf (AMH) adalah tolak ukur penting dalam mempertimbangkan kemampuan sumber daya manusia di suatu daerah.

Hasil Susenas 2024 menunjukkan bahwa persentase penduduk berumur 15 tahun ke atas menurut kemampuan membaca dan menulis di Kabupaten Jayawijaya sebesar 84.91 persen. Gambarnya disajikan pada grafik berikut:

Grafik 4. 12 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Kemampuan Membaca dan Menulis di Kabupaten Jayawijaya, 2024



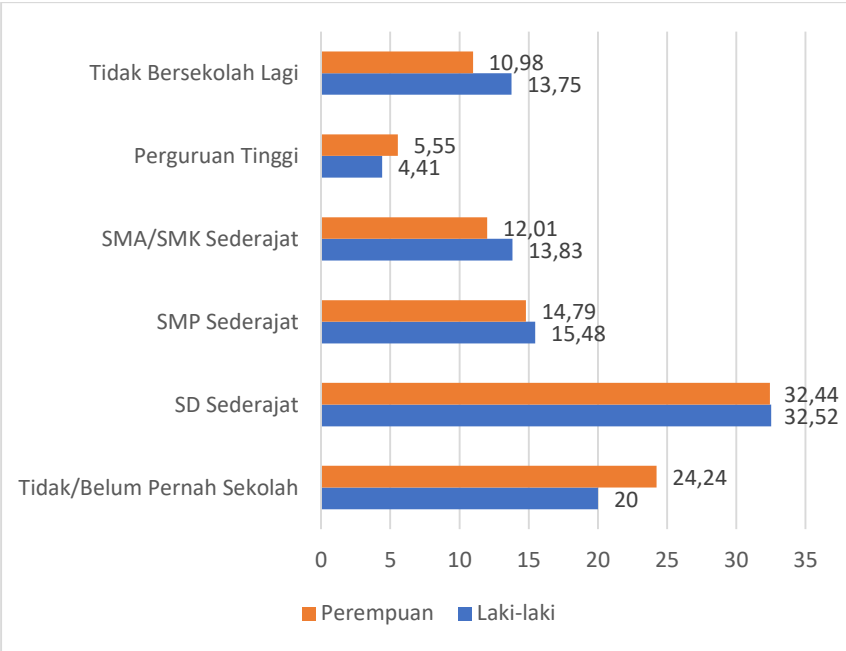
Sumber: BPS, Susenas 2024

## B. Tingkat Pendidikan

Salah satu ukuran kualitas sumber daya manusia dapat dievaluasi melalui pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Tingkat pendidikan terakhir yang ditamatkan dapat diidentifikasi melalui ijazah/STTB tertinggi yang dimiliki. Semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat, maka semakin tinggi kesejahteraannya. Kualitas sumber daya manusia merupakan modal dasar dalam menghadapi persaingan global.

Hasil Susenas 2024 menunjukkan bahwa secara umum tingkat pendidikan masyarakat Jayawijaya masih tergolong rendah. Sebanyak 17,58 persen laki-laki dan 18,81 persen perempuan berusia 7–24 tahun tercatat belum pernah bersekolah. Sementara itu, 25,60 persen laki-laki dan 31,84 persen perempuan masih bersekolah di tingkat SD/ sederajat. Di tingkat SMP/ sederajat, persentasenya mencapai 18,66 persen pada laki-laki dan 20,09 persen pada perempuan. Selanjutnya, 23,61 persen laki-laki dan 21,33 persen perempuan menempuh pendidikan SMA atau yang lebih tinggi. Adapun penduduk yang sudah tidak bersekolah lagi tercatat sebesar 14,55 persen pada laki-laki dan 7,94 persen pada perempuan.

Grafik 4. 13 Penduduk Berumur 7-23 Tahun menurut Jenis Kelamin dan Status Pendidikan Kabupaten Jayawijaya, 2024



Sumber: BPS Kab. Jayawijaya, Susenas 2024

C. Tingkat Partisipasi Sekolah (APS dan APM)

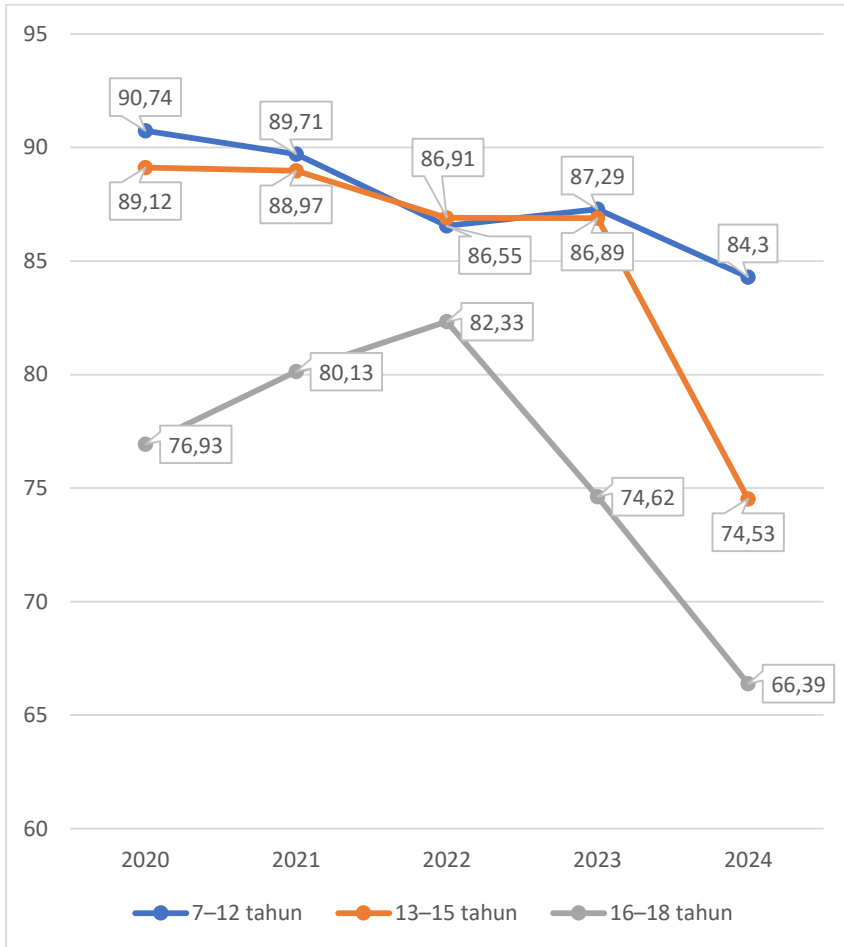
Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses pada pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. APS didefinisikan sebagai persentase penduduk yang bersekolah menurut kelompok umur tertentu. Oleh karena itu, ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah tercermin dalam APS. APS yang tinggi menunjukkan tingginya partisipasi sekolah oleh penduduk usia tertentu. APS juga dapat digunakan untuk melihat

struktur kegiatan penduduk yang berkaitan dengan sekolah.

Faktor demografis seperti umur sangat memengaruhi akses penduduk terhadap pendidikan. Semakin tinggi kelompok umur sekolah, semakin rendah pula tingkat partisipasi sekolahnya. Hal ini terlihat dari Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Jayawijaya tahun 2024, di mana APS penduduk usia 7–12 tahun mencapai 84,30 persen, artinya masih ada sekitar 15,70 persen anak usia sekolah dasar yang belum bersekolah. Untuk kelompok usia 13–15 tahun, APS menurun menjadi 74,53 persen, dan semakin rendah pada kelompok usia 16–18 tahun yakni hanya 66,39 persen.

Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar anak-anak usia sekolah dasar sudah bersekolah, banyak di antara mereka yang tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Faktor utama yang memengaruhi hal ini antara lain keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan di wilayah pedalaman serta kondisi geografis Jayawijaya yang sulit dijangkau. Selain itu, tekanan ekonomi juga mendorong sebagian penduduk usia sekolah untuk berhenti belajar lebih awal dan memilih bekerja guna membantu perekonomian keluarga.

Grafik 4. 14 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kabupaten Jayawijaya, 2020-2024

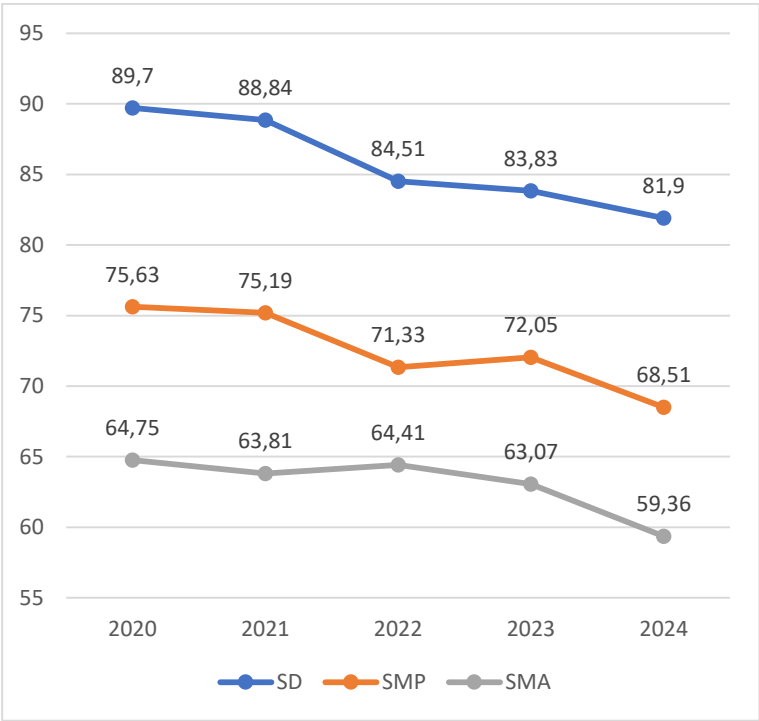


Sumber: BPS Kab. Jayawijaya, Susenas 2020-2024

Indikator lain untuk melihat partisipasi penduduk dalam mengakses pendidikan adalah Angka Partisipasi Murni (APM). APM diartikan sebagai proporsi penduduk kelompok umur sekolah tertentu yang

masih bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan kelompok umurnya terhadap jumlah penduduk pada kelompok umur sekolah tersebut. APM menunjukkan partisipasi pendidikan penduduk pada tingkat tertentu yang sesuai dengan umurnya. Dengan demikian, APM mencerminkan penduduk umur sekolah yang bersekolah tepat waktu.

Grafik 4. 15 Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) di Kabupaten Jayawijaya, 2020-2024



Sumber: BPS Kab. Jayawijaya, Susenas 2020-2024

APM untuk tingkat pendidikan SD di Kabupaten Jayawijaya pada tahun 2024 tercatat sebesar 81,90 persen. Angka ini menunjukkan bahwa dari seluruh

anak berusia 7–12 tahun, hanya sekitar delapan dari sepuluh anak yang bersekolah tepat waktu di jenjang SD. Untuk tingkat SMP, capaian APM mencapai 68,51 persen atau sekitar tujuh dari sepuluh anak usia 13–15 tahun yang bersekolah sesuai jenjangnya. Sementara itu, di jenjang SMA, APM hanya sebesar 59,36 persen, yang berarti masih ada lebih dari empat dari sepuluh anak usia 16–18 tahun belum menempuh pendidikan pada waktunya.

Kondisi ini menunjukkan bahwa APM pada setiap jenjang pendidikan di Jayawijaya masih jauh dari angka ideal 100 persen. Semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin rendah capaian APM yang terlihat dari data 2024. Fenomena tersebut mencerminkan adanya tantangan serius dalam upaya meningkatkan partisipasi sekolah, baik karena keterbatasan akses, faktor ekonomi, maupun kondisi geografis. Perlu adanya intervensi kebijakan yang lebih kuat agar seluruh anak dapat bersekolah tepat waktu sesuai dengan jenjang pendidikannya.

D. Kualitas Pelayanan Pendidikan

Tabel 4. 5 Jumlah Sekolah, Murid, Guru dan Rasio Murid-Guru Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Jayawijaya, 2024/2025

Jenjang	Sekolah	Murid	Guru	Rasio Murid-Guru
TK	60	1767	167	10.58
KB	75	1546	119	12.99
TPA	0	0	0	0.00

Jenjang	Sekolah	Murid	Guru	Rasio Murid-Guru
SPS	28	597	51	11.71
PKBM	110	12461	280	44.50
SKB	0	0	0	0.00
SD	136	25402	997	25.48
SMP	46	8471	464	18.26
SMA	18	4391	260	16.89
SMK	12	2394	118	20.29
SLB	0	0	0	0.00
<b>Total</b>	<b>485</b>	<b>57029</b>	<b>2456</b>	<b>23.22</b>

Sumber: Dapodik Semester Genap 2024/2025

Dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan yang bermutu, penyelenggara pendidikan berkewajiban menyediakan fasilitas pendidikan sesuai standar nasional, baik berupa sekolah, ruang kelas, maupun tenaga pengajar. Jumlah sekolah yang ada di Kabupaten Jayawijaya pada Tahun Ajaran 2024/2025 tercatat sebanyak 485 unit dengan total murid sebanyak 57.029 orang dan 2.456 guru. Keberadaan fasilitas pendidikan ini tentu memberikan kesempatan lebih luas bagi anak-anak untuk dapat mengenyam pendidikan. Namun demikian, jika dibandingkan dengan jumlah penduduk usia sekolah, ketersediaan sekolah dan tenaga pengajar masih tergolong terbatas sehingga dapat membatasi akses pendidikan bagi sebagian anak.

Selain jumlah sekolah, mutu pendidikan juga sangat dipengaruhi oleh ketersediaan dan beban guru. Salah satu indikator yang digunakan untuk menilai beban



guru adalah rasio murid-guru, yaitu perbandingan antara jumlah murid dengan jumlah guru pada masing-masing jenjang pendidikan. Rasio ini menggambarkan rata-rata jumlah murid yang harus ditangani oleh seorang guru. Standar ideal yang berlaku di Indonesia adalah 1:40 untuk SD, serta 1:21 untuk SMP dan SMA.

Dari tabel terlihat bahwa rasio murid-guru di Jayawijaya pada tahun ajaran 2024/2025 bervariasi antar jenjang. Pada tingkat SD tercatat rasio sebesar 25,48 murid per guru, SMP sebesar 18,26 murid per guru, dan SMA sebesar 16,89 murid per guru. Dengan demikian, ketiga jenjang utama tersebut telah memenuhi standar nasional, bahkan rasio pada SMP dan SMA lebih rendah dari standar ideal yang menunjukkan beban guru relatif lebih ringan. Namun, pada SD meskipun masih dalam batas wajar, rasio murid-guru relatif lebih tinggi dibanding jenjang lain.

Secara keseluruhan, kondisi ini menunjukkan bahwa mutu pendidikan di Kabupaten Jayawijaya sudah cukup layak karena rasio murid-guru di semua jenjang pendidikan inti (SD, SMP, dan SMA) berada dalam standar yang berlaku. Meskipun demikian, masih diperlukan peningkatan jumlah sekolah maupun tenaga pengajar, terutama di jenjang dasar, agar kesempatan memperoleh pendidikan bermutu semakin merata bagi seluruh anak usia sekolah.

### **4.3.3 Indikator Perekonomian**

Paradigma konvensional dari suatu pembangunan adalah memfokuskan pembangunan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Seiring dengan perkembangannya, paradigma ini mulai mengalami perluasan konsep, di mana sebelumnya manusia berperan sebagai alat dari suatu pembangunan, berubah menjadi manusia sebagai tujuan akhir dari suatu pembangunan. Paradigma ini dikenal dengan istilah pembangunan manusia. Menurut UNDP (1990) pembangunan manusia merupakan suatu proses untuk memperbanyak pilihan-pilihan yang dimiliki manusia. Diantara banyak pilihan tersebut, pilihan yang terpenting adalah untuk berumur panjang dan sehat, untuk berilmu pengetahuan, dan untuk mempunyai akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan agar dapat hidup secara layak.

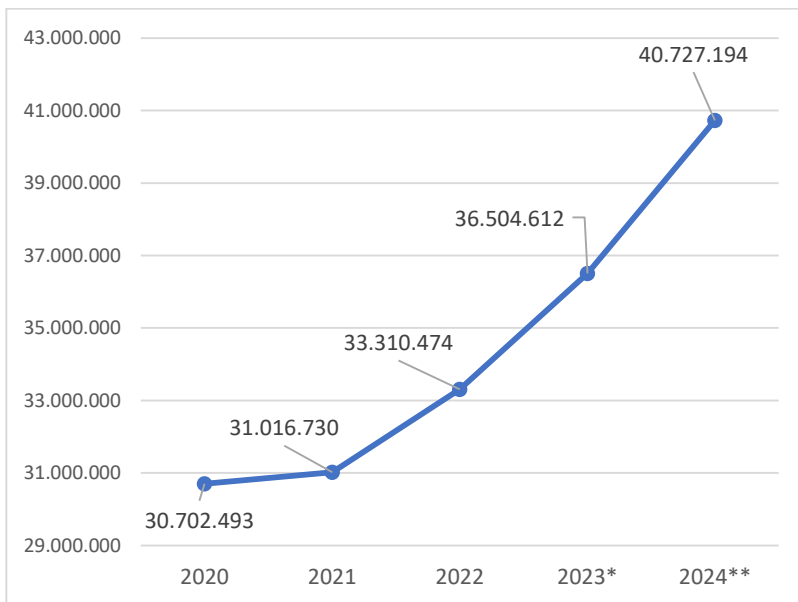
Konsep ini membawa penduduk sebagai pusat dari pembangunan, dan bukan meletakkannya di sekeliling pembangunan. Meskipun demikian, akselerasi pembangunan manusia yang tinggi tidak akan tercapai tanpa didukung dengan pembangunan ekonomi yang mumpuni. Indikator makro ekonomi yang dapat mengukur pembangunan ekonomi suatu daerah, diantaranya adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita, penyerapan tenaga kerja, dan distribusi pendapatan.

#### **A. PDRB per Kapita**

PDRB per kapita merupakan gambaran nilai tambah yang diterima oleh masing-masing penduduk akibat adanya aktivitas ekonomi/produksi. Angka PDRB per kapita dapat dijadikan sebagai salah satu indikator

kesejahteraan rakyat, walaupun tidak dapat secara langsung menggambarkan tingkat kesejahteraan/kemakmuran suatu kelompok masyarakat atau penduduk.

Grafik 4. 16 Perkembangan PDRB per Kapita (Rp) di Kabupaten Jayawijaya, 2020-2024



Sumber: BPS Kab. Jayawijaya

Keterangan:

\* Angka sementara / Preliminary Figures

\*\* Angka sangat sementara / Very Preliminary Figures

Seiring dengan aktivitas ekonomi yang kian tumbuh, PDRB per kapita Jayawijaya juga menunjukkan tren peningkatan. Nilai PDRB per kapita diperoleh dari hasil bagi antara PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB)

dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Jika pada tahun 2020 PDRB per kapita penduduk Jayawijaya tercatat sebesar Rp30,70 juta, pada tahun 2023 meningkat menjadi Rp36,50 juta, dan pada tahun 2024 kembali naik signifikan menjadi Rp40,73 juta. Kenaikan ini secara tidak langsung mengindikasikan adanya perbaikan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Jayawijaya dari tahun ke tahun.

## **B. Ketenagakerjaan (TPAK dan TPT)**

Beberapa indikator yang dapat menggambarkan melihat keberhasilan pembangunan suatu daerah dilihat dari aspek ketenagakerjaan antara lain Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Beberapa indikator tersebut merupakan data hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) tahun 2018.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi. TPAK diperoleh dari perbandingan jumlah angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. Penduduk dikatakan telah memasuki usia kerja jika berusia 15 tahun ke atas. Selanjutnya tidak semua penduduk usia kerja tergolong sebagai angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk yang aktif dalam pasar kerja, baik mereka yang sedang bekerja, mencari pekerjaan, maupun sementara tidak bekerja. Dengan kata lain TPAK mengukur partisipasi aktif penduduk dalam perekonomian.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT),  
Pengangguran terbuka (open unemployment)

didefinisikan sebagai penduduk usia kerja yang tidak bekerja dan sementara tidak bekerja, terdiri dari :

- a. Mereka yang mencari pekerjaan.
- b. Mereka yang mempersiapkan usaha.
- c. Mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan.
- d. Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Pengertian pengangguran tidak dapat disamakan dengan pencari kerja, karena sering kali terjadi di antara pencari kerja terdapat mereka yang tergolong bekerja namun karena berbagai alasan masih mencari pekerjaan lain, untuk kasus tersebut dia akan tergolong sebagai bekerja. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) diperoleh dari hasil bagi antara jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja.

Tabel 4. 6 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Jayawijaya, 2024

Kabupaten	2024		
	Angkatan Kerja	Pengangguran	TPT
Jayawijaya	181540	4979	2.74

Sumber: BPS Kab. Jayawijaya, Sakernas 2024

Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) tahun 2024, jumlah angkatan kerja di Kabupaten Jayawijaya mencapai 181.540 orang dengan

jumlah penganggur sebanyak 4.979 orang. Hal ini menghasilkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 2,74 persen. Angka ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk usia kerja di Jayawijaya telah terserap dalam kegiatan ekonomi, meskipun masih ada sebagian kecil yang belum memperoleh pekerjaan.

Meskipun demikian, TPT yang relatif rendah bukan berarti seluruh penduduk telah sejahtera. Pada umumnya, pola pekerjaan di Jayawijaya masih didominasi oleh sektor pertanian subsisten di mana seluruh anggota rumah tangga dapat terlibat, baik sebagai pekerja utama maupun sekadar membantu. Kondisi ini membuat banyak penduduk tetap dikategorikan sebagai bekerja walaupun produktivitas dan tingkat pendapatannya masih rendah. Dengan demikian, rendahnya tingkat pengangguran harus dipahami secara hati-hati karena tidak selalu mencerminkan kualitas pekerjaan dan kesejahteraan yang lebih baik.

### **C. Distribusi Pendapatan**

Beberapa aspek yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk adalah aspek pendapatan, tingkat konsumsi dan pola konsumsi. Besarnya tingkat pendapatan seseorang sangat menentukan besarnya tingkat dan pola konsumsi.

Adanya peningkatan pendapatan biasanya akan diikuti oleh pertumbuhan pola dari komposisi pengeluaran untuk makanan ke pengeluaran bukan makanan (Engel's Law). Hal tersebut terkait dengan tingkat kepuasan manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Pemenuhan kebutuhan akan makanan

merupakan syarat minimum untuk setiap individu bertahan hidup namun pemenuhan kebutuhan makanan akan mencapai kepuasan maksimum pada tingkat tertentu atau adanya titik kejenuhan sehingga pengeluaran makanan juga akan terbatas sampai titik jenuh tersebut. Berbeda dengan kebutuhan akan non makanan yang tak terbatas atau tidak ada titik jenuhnya, sehingga setelah kebutuhan akan makanan terpenuhi tentunya kenaikan pendapatan akan lebih cenderung digunakan untuk memenuhi kebutuhan non makanan.

Di negara-negara yang lebih maju, persentase konsumsi makanan biasanya di bawah 50 persen. Disamping itu, di negara-negara berkembang dari segi pemerataan pendapatan masih sulit diwujudkan. Dalam usaha pemerataan pendapatan ini pemerintah berusaha memberantas kemiskinan dengan jalan pemerataan pembangunan, pemerataan hasil-hasil pembangunan. Dengan pemerataan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di masa yang akan datang.

Gini Ratio, Indikator yang bisa digunakan untuk mengukur sejauh mana tingkat ketimpangan pendapatan penduduk antara lain rasio gini dan kriteria Bank Dunia. Rasio gini merupakan ukuran distribusi pendapatan yang mempunyai nilai nol sampai dengan satu. Apabila nilai rasio gini mendekati 0, maka kesenjangan distribusi pendapatan dianggap rendah. Sebaliknya, apabila rasio gini mendekati angka 1, maka kesenjangan distribusi makin tinggi. Rasio gini dibagi dalam tiga kategori:

- a.  $GR > 0,5$  keadaan ini menggambarkan distribusi pendapatan dengan tingkat ketimpangan tinggi
- b.  $GR 0,4 - 0,5$  keadaan ini menggambarkan distribusi pendapatan dengan tingkat ketimpangan sedang
- c.  $GR < 0,4$  keadaan ini menggambarkan distribusi pendapatan dengan tingkat ketimpangan rendah

Distribusi pendapatan penduduk di Kabupaten Jayawijaya pada tahun 2024 juga termasuk ke dalam kategori ketimpangan rendah, di mana pada tahun 2024, Gini Ratio Kabupaten Jayawijaya adalah 0,327. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi pendapatan penduduk Jayawijaya hampir merata.

Pola Pengeluaran Rumah Tangga, Pada negaranegara berkembang seperti Indonesia, pengeluaran untuk konsumsi makanan masih relatif besar (mendekati 50 persen) dari total pengeluaran per kapita. Sebaliknya pada negara maju pengeluaran per kapita yang bersifat sekunder seperti aneka barang dan jasa yang mencakup pengeluaran untuk perawatan kesehatan, rekreasi, olah raga, pendidikan dan lain-lain, adalah merupakan bagian terbesar dari pengeluaran per kapita.



Tabel 4. 7 Rata-rata Pengeluaran dan Konsumsi per Kapita di Kabupaten Jayawijaya, 2024

<b>Kelompok Pengeluaran &amp; Konsumsi</b>	<b>Rata-rata</b>
Konsumsi Kalori Perkapita Sehari (Kcal)	1649.17
Konsumsi Protein Perkapita Sehari (gram)	39.21
Pengeluaran Makanan Perkapita Sebulan (Rupiah)	1046981
Pengeluaran Non Makanan Perkapita Sebulan (Rupiah)	750797
<b>Pengeluaran Perkapita Sebulan (Rupiah)</b>	<b>1797778</b>

Sumber: BPS Kab. Jayawijaya, Susenas 2024

Tabel di atas menunjukkan rata-rata pengeluaran per kapita penduduk Jayawijaya per bulan menurut jenis pengeluaran. Berdasarkan hasil Susenas tahun 2023, sebesar Rp1.046.981 atau lebih dari separuh total pengeluaran penduduk Jayawijaya dialokasikan untuk konsumsi makanan. Sementara itu, sisanya sebesar Rp750.797 dialokasikan untuk konsumsi non-makanan.



# *BAB V*

## ***PENUTUP***

## BAB V PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan kajian terhadap indikator-indikator tunggal kesejahteraan rakyat maupun indikator agregat IPM, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dibangun atas tiga dimensi pokok, yaitu:
  - a. Lamanya hidup (longevity), yang mencerminkan derajat kesehatan masyarakat;
  - b. Pengetahuan/tingkat pendidikan (knowledge), sebagai ukuran kualitas sumber daya manusia;
  - c. Standar hidup layak (decent living), yang menggambarkan kemampuan ekonomi masyarakat.
2. Perubahan Metodologi IPM  
Sejak revisi metode, terdapat beberapa perbedaan mendasar dibanding metode lama:
  - a. Penghitungan tidak lagi berbasis rata-rata aritmetik, tetapi memakai rata-rata geometrik.
  - b. Angka Melek Huruf diganti dengan Harapan Lama Sekolah (HLS).
  - c. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) kini dihitung untuk penduduk usia 25 tahun ke atas, bukan 15 tahun ke atas.
  - d. Perhitungan Purchasing Power Parity (PPP) menggunakan 96 komoditi terpilih, jauh lebih luas dibanding 27 komoditi pada metode lama.

- e. Klasifikasi kategori level IPM lebih ketat, sehingga standar pencapaian meningkat dibanding metode lama.
3. Dampak Penggunaan Metode Baru
- Implikasi penerapan metode baru antara lain:
- a. Secara umum, nilai IPM cenderung lebih rendah dibanding hasil metode lama.
  - b. Terjadi pergeseran peringkat IPM antarwilayah.
  - c. Hasil IPM dengan metode baru tidak dapat langsung dibandingkan dengan peringkat IPM metode lama, karena indikator dan metodologinya berbeda.
4. Capaian Kabupaten Jayawijaya
- a. IPM Kabupaten Jayawijaya tercatat sebesar 58,03 pada tahun 2020, kemudian naik menjadi 58,67 pada tahun 2021, meningkat lagi menjadi 59,60 pada tahun 2022, dan mencapai 60,50 pada tahun 2023. Pada tahun 2024, IPM Jayawijaya mencapai 61,03. Selama periode 2020–2024, IPM Kabupaten Jayawijaya meningkat sebesar 3,00 poin, yang mencerminkan adanya perbaikan berkelanjutan dalam kualitas hidup masyarakat.

## 5.2 Saran

Pemerintah Kabupaten Jayawijaya telah memulai pembangunan dengan mengutamakan pembangunan kualitas kesehatan, pendidikan dan perekonomian menuju Jayawijaya Baru.

Dukungan semua pihak akan mengantarkan Kabupaten Jayawijaya sejajar dengan kabupaten/kota lain yang lebih dahulu maju. Dengan mengacu pada capaian IPM tahun 2024, tantangan pembangunan manusia semakin jelas. Pembangunan Infrastruktur di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi harus terus dilakukan dan menjadi prioritas utama. Pembangunan Sekolah, Rumah Sakit, Puskesmas, dan Pustu yang baru harus selalu dilakukan tiap tahun untuk mendukung pendidikan dan kesehatan masyarakat. Selain itu, jumlah dan kualitas tenaga pengajar dan tenaga medis juga perlu untuk selalu ditingkatkan. Pembinaan masyarakat dengan memanfaatkan keunggulan dan produksi lokal dan memberikan jalan untuk memasarkan produksi tersebut akan meningkatkan pendapatan masyarakat.

# ***DAFTAR PUSTAKA***

## DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Jayawijaya. (2025). Jayawijaya dalam angka 2024. BPS Kabupaten Jayawijaya.

Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Jayawijaya. (2025). Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Kabupaten Jayawijaya 2024. BPS Kabupaten Jayawijaya.

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua. (2025). Profil ketenagakerjaan Provinsi Papua 2024. BPS Provinsi Papua.

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua. (2025). Statistik kesejahteraan rakyat Provinsi Papua 2024. BPS Provinsi Papua.

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua. (2025). Indikator pendidikan Provinsi Papua 2024. BPS Provinsi Papua.

Badan Pusat Statistik (BPS), United Nations Development Programme (UNDP), & Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). (2001). Indonesia laporan pembangunan manusia 2001. BPS.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayawijaya. (2025). Data kependudukan Kabupaten Jayawijaya tahun 2024. Disdukcapil Kabupaten Jayawijaya.

Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya. (2025). Profil kesehatan Kabupaten Jayawijaya tahun 2024. Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya.



Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2025). Data Pokok Pendidikan (Dapodik) semester genap tahun ajaran 2024/2025. Jakarta: Kemdikbudristek.

United Nations Development Programme (UNDP). (2010). Human development report 2010: The real wealth of nations—Pathways to human development. Palgrave Macmillan.

United Nations Development Programme (UNDP). (2014). Human development report 2014: Sustaining human progress—Reducing vulnerabilities and building resilience. UNDP.

Republik Indonesia. (1997). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39.

Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47.

Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.



# *LAMPIRAN*

# LAMPIRAN

Kode	Kabupaten/Kota	IPM (UHH SP2010)					IPM (UHH LF SP2020)					UHH (SP2010)									
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024					
9400	PAPUA	60,44	60,62	61,39	52,45	53,42	61,22	61,40	62,16	53,45	54,43	65,79	65,93	66,23	64,66	64,80					
9701	Nduga	31,55	32,84	34,10	35,19	36,30	33,74	35,13	36,51	37,68	38,88	55,27	55,43	55,70	55,72	55,74					
9702	Jayawijaya	58,03	58,67	59,60	60,50	61,03	62,16	62,85	63,85	64,81	65,38	59,64	59,90	60,26	60,50	60,65					
9703	Lanny Jaya	47,86	48,68	49,62	50,56	51,59	48,12	48,93	49,87	50,81	51,84	66,06	66,11	66,31	66,51	66,62					
9704	Toilika	49,50	49,60	50,51	51,48	52,05	49,77	49,87	50,77	51,74	52,31	65,71	65,83	66,08	66,33	66,53					
9705	Memberamo Tengah	47,57	48,32	49,25	50,22	50,72	49,19	49,97	50,96	51,98	52,5	63,59	63,75	64,05	64,14	64,18					
9706	Yalimo	48,34	49,01	49,90	50,87	51,85	48,34	49,01	49,90	50,87	51,85	65,42	65,49	65,72	65,95	66,12					
9707	Yahukimo	49,37	49,48	50,25	51,19	51,98	49,37	49,48	50,25	51,19	51,97	65,93	66,05	66,31	66,42	66,55					
9708	Pegunungan Bintang	45,44	46,28	47,21	48,18	49,36	45,77	46,61	47,54	48,51	49,69	64,44	64,54	64,79	64,99	65,17					
Kode	Kabupaten/Kota	UHH (LF SP2020)					Harapan Lama Sekolah (RLS)					Rata-rata Lama Sekolah (RLS)					Pengeluaran Rilll per Kapita				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
9400	PAPUA	67,59	67,72	67,98	67,27	67,39	11,08	11,11	11,14	9,96	9,97	6,69	6,76	7,02	4,01	4,21	6,954	6,955	7,146	5,377	5,707
9701	Nduga	63,14	63,40	63,84	63,88	63,90	3,61	3,87	4,07	4,33	4,45	1,13	1,42	1,58	1,71	1,92	3,975	3,976	4,190	4,352	4,597
9702	Jayawijaya	68,72	69,04	69,49	69,79	69,98	12,27	12,53	12,83	12,84	12,85	5,51	5,60	5,74	5,98	5,99	7,441	7,545	7,765	8,159	8,534
9703	Lanny Jaya	66,81	66,85	67,02	67,19	67,29	8,62	8,89	9,07	9,27	9,44	3,20	3,43	3,59	3,71	3,83	4,350	4,393	4,559	4,751	5,026
9704	Toilika	66,47	66,58	66,81	67,03	67,22	8,60	8,61	8,83	9,02	9,03	3,64	3,65	3,67	3,68	3,69	4,826	4,841	5,079	5,397	5,653
9705	Memberamo Tengah	68,18	68,40	68,81	68,93	68,99	8,93	9,22	9,44	9,62	9,78	3,15	3,33	3,48	3,63	3,7	4,462	4,487	4,630	4,855	4,943
9706	Yalimo	65,42	65,49	65,72	65,95	66,12	9,11	9,32	9,50	9,66	9,8	2,79	3,01	3,19	3,34	3,55	4,647	4,664	4,802	5,015	5,226
9707	Yahukimo	65,93	66,05	66,31	66,42	66,51	7,61	7,62	7,80	8,04	8,05	4,26	4,27	4,28	4,34	4,35	4,875	4,895	5,101	5,351	5,747
9708	Pegunungan Bintang	65,40	65,50	65,74	65,93	66,1	6,25	6,47	6,59	6,78	7,01	2,81	3,04	3,23	3,37	3,51	4,509	5,429	5,618	5,849	6,196





**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN JAYAWIJAYA**

*Jl Yos Sudarso, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi  
Papua Pegunungan*